



RECOVER TOGETHER  
RECOVER STRONGER



PISAgro



# THE FARM

Featured Agriculture Reportings Magazine

EDISI BULAN NOVEMBER  
*NOVEMBER EDITION*



# PESAN DARI DIREKTUR KAMI

Rekan-rekan yang Terhormat,

Kita berjumpa kembali di The FARM edisi November 2022. Ketahanan pangan menjadi sorotan global dalam rangka mendukung upaya pemulihan multisektoral pascapandemi COVID-19 serta krisis-krisis lainnya, serta menunjang resiliensi di tengah tantangan-tantangan yang terjadi saat ini.

Pada bulan ini, PISAgro mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) B20 Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 November di Nusa Dua, Bali. PISAgro juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Republik Indonesia atas terselenggaranya KTT G20 dan KADIN Indonesia atas terselenggaranya KTT B20 dengan hasil yang membanggakan.

Dalam buletin ini, kita akan membahas tentang KTT B20 dan G20 yang diselenggarakan di Indonesia pada November 2022, beserta keluarannya yang berkaitan dengan pertanian. Pada edisi kali ini, kami juga berkesempatan berbincang dengan Ibu Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Sekretariat B20 Indonesia, untuk mengenal lebih jauh tentang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) B20 dan G20 Indonesia serta persiapannya untuk Keketuaan ASEAN 2023. Dari Konferensi Tingkat Tinggi COP27, dibahas juga tantangan di sektor pertanian dan solusinya dalam menghadapi perubahan iklim.

Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan kepada kami, sehingga Sekretariat PISAgro dapat terus menjalankan kegiatan kami. Tak lupa juga, PISAgro siap mendukung Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2023. Selamat membaca The FARM edisi kali ini, dan semoga buletin ini dapat menjadi sumber inspirasi baru bagi Anda.

**Insan Syafaat**

Direktur Eksekutif PISAgro



# OPENING REMARKS

Dear Readers,

We meet again in the November 2022 edition of The FARM. Food security becoming the global focus in order to support multi-sectoral recovery efforts after the COVID-19 pandemic and other crises, as well as supporting resilience amidst the current challenges so far.

This month, PISAgro had the honour to be part of the B20 Indonesia Summit which was held on the 13th to 14th of November in Nusa Dua, Bali. PISAgro also congratulate Government of the Republic of Indonesia for holding the G20 Summit and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia) for holding the B20 Summit with proud outcomes.

In this bulletin, we will discuss the B20 and G20 Summits that held in Indonesia in November 2022, and its outcomes related to the agriculture. In this edition, we also had the opportunity to talk with Ms. Shinta Widjaja Kamdani, Head of the Indonesian B20 Secretariat, to learn more about Indonesia's B20 and G20 Summits (Summits) and preparations for the 2023 ASEAN Chair. From the COP27 Summit, challenges in the agricultural sector and their solutions in dealing with climate change were also discussed.

Finally, we would also like to thank all of you for the support that has been given to us, so that the PISAgro Secretariat can continue to carry out our activities. Also not to forget, PISAgro is ready to support Indonesia's Chairmanship for ASEAN in 2023. Happy reading this edition of The FARM, and we hope that this bulletin can be a source of new inspiration for you.

**Insan Syafaat**  
Executive Director of PISAgro



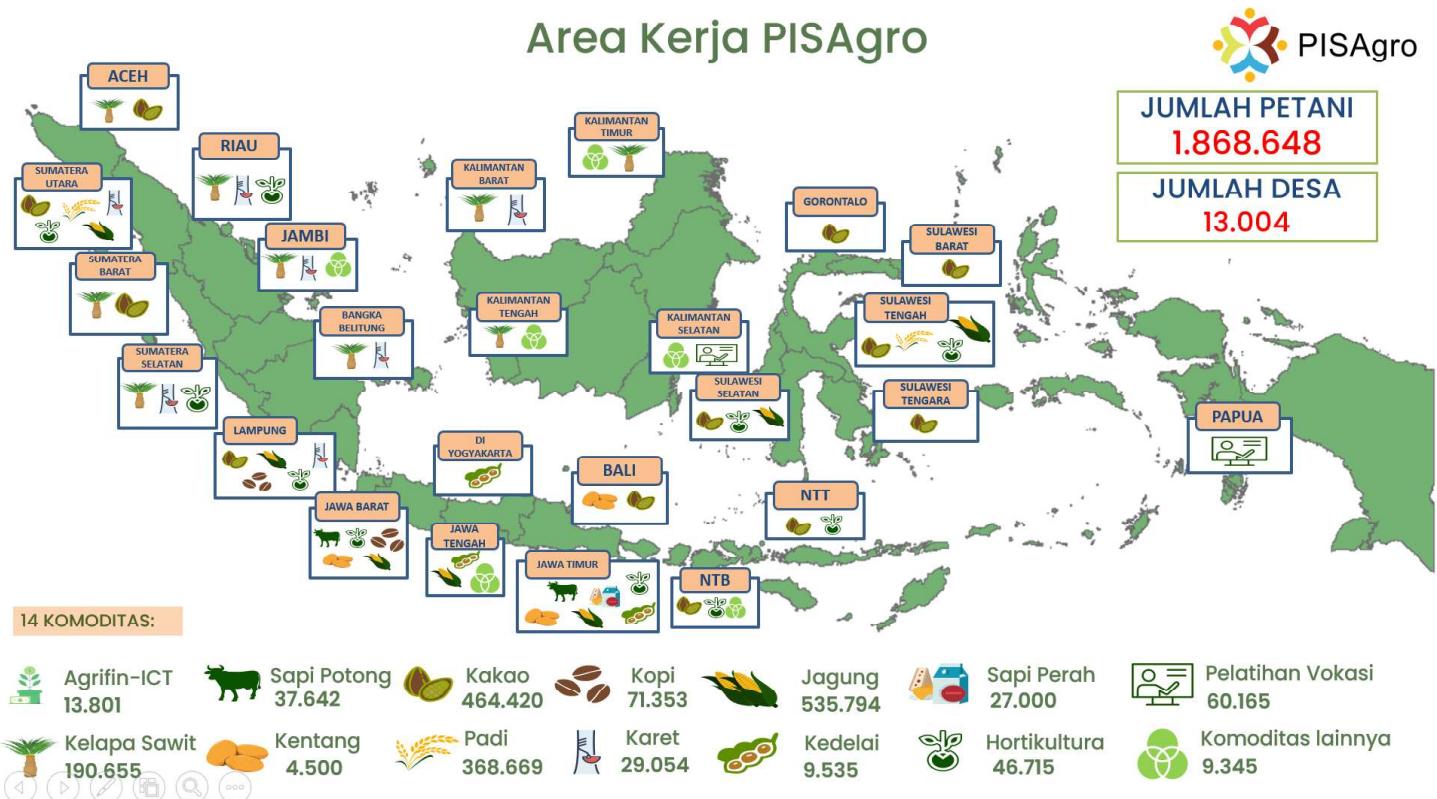
# THE FARM

## CONTENTS

■ Pesan dari Direktur Kami	I
■ <i>Opening Remarks</i>	II
■ Sorotan PISAgro 2.0	3
■ <i>PISAgro 2.0 Highlights</i>	6
■ Sorotan	9
■ <i>Highlights</i>	13
■ Warta Agro	17
■ <i>Agro News</i>	20
■ Cerita G20 Indonesia	23
■ <i>G20 Indonesia Story</i>	26
■ Fitur	29
■ <i>Feature</i>	33
■ Profil	37
■ <i>Profile</i>	42

## CAPAIAN DASBOR PISAGRO 2.0 SAAT INI - NOVEMBER 2022

(Disusun oleh Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, dan Sandra Pratiwi)



## PISAGRO 2.0 DASHBOARD



**37**  
desa

**12.727**  
petani

**16.464**  
ha lahan

## OVERVIEW



### GROWTH

**51%** dari total petani memiliki akses kepada bantuan finansial (KUR, pinjaman, hibah)  
6.101 dari 12.727 petani

**79%** dari total hasil panen petani dibeli langsung oleh perusahaan (88.886 ton hasil panen)

**28%** dari total petani berpartisipasi dalam lembaga koperasi  
3.607 out of 12.727

### RESILIENCE

**54%**

20 dari 37



desa didukung oleh perusahaan dalam kualitas ketahanan hidup  
setidaknya 1 fasilitas penunjang kesehatan petani beroperasi dan didukung oleh perusahaan di setiap desa

Jenis aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan petani:

**16**  
kampanye

**11** (dilakukan 1-2 kali dalam setahun)  
sosialisasi

### SUSTAINABILITY

**59%**

22 dari 37

**89%**

6.787 dari 7.688 ha lahan

Jenis aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung petani mengimplementasikan manajemen limbah:

**35**  
kampanye

**30** sosialisasi

**37** pelatihan

(dilakukan 2-3 kali dalam setahun)

## GROWTH

**51%**  
6.101 dari 12.727

dari total petani memiliki akses kepada bantuan finansial (KUR, pinjaman, hibah)

**79%**

dari total hasil panen petani dibeli langsung oleh perusahaan (88.768 ton hasil panen)

**28%**

dari total petani berpartisipasi dalam lembaga koperasi  
3.607 dari 12.727

**31%**

dari total petani berpartisipasi dalam pelatihan praktik pertanian baik yang dilakukan oleh perusahaan (dalam 2-3 kali setahun)

**21%**

2.673 dari 12.727

dari total petani telah mengimplementasikan Praktik Pertanian yang baik<sup>1</sup> dalam setiap proses produksinya

2.132 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam input-sourcing

1.892 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam penanganan pasca-panen

2.051 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam operasi pertanian

Rata-rata pendapatan petani per bulan dari tiap komoditas:



3.000.000



2.500.000



6.000.000



3.500.000

<sup>1</sup> Praktik Pertanian Baik (PPB/GAP) adalah pedoman yang umum digunakan oleh petani untuk membantu upaya implementasi praktik pertanian berkelanjutan dan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk



## RESILIENCE



setidaknya

**1**

fasilitas penunjang kesehatan petani beroperasi dan didukung oleh perusahaan di setiap desa

**24%**

3.047 dari 12.727  
total petani  
mengimplementasikan  
praktik pencegahan  
bencana

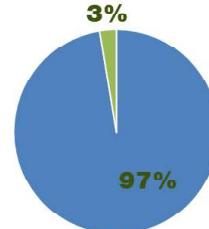
- 2.065 petani menggunakan peralatan yang memadai untuk menghadapi bencana iklim
- 1.930 petani mengimplementasikan praktik pertanian yang dapat mencegah bencana kebakaran
- 2.895 petani mengimplementasikan praktik pertanian yang dapat mencegah bencana banjir

Jenis aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan petani:

**16**    **11**

kampanye    sosialisasi

Dilakukan 1-2 kali dalam setahun



2 berdasarkan kondisi data check-up tahunan

## SUSTAINABILITY



**89%**

6.787 dari 7.688 ha lahan

dari total lahan kelapa sawit perusahaan  
berada di bawah pengelolaan lahan  
berkelanjutan

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung petani dalam implementasi:

### Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

**9**    **9**    **8**  
kampanye    sosialisasi    pelatihan  
dilakukan 1 kali setiap tahunnya

### Manajemen Limbah

**35**    **30**    **37**  
kampanye    sosialisasi    pelatihan  
dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

### Manajemen Biodiversitas

**3**    **2**    **3**  
kampanye    sosialisasi    pelatihan  
dilakukan 1 kali setiap tahunnya

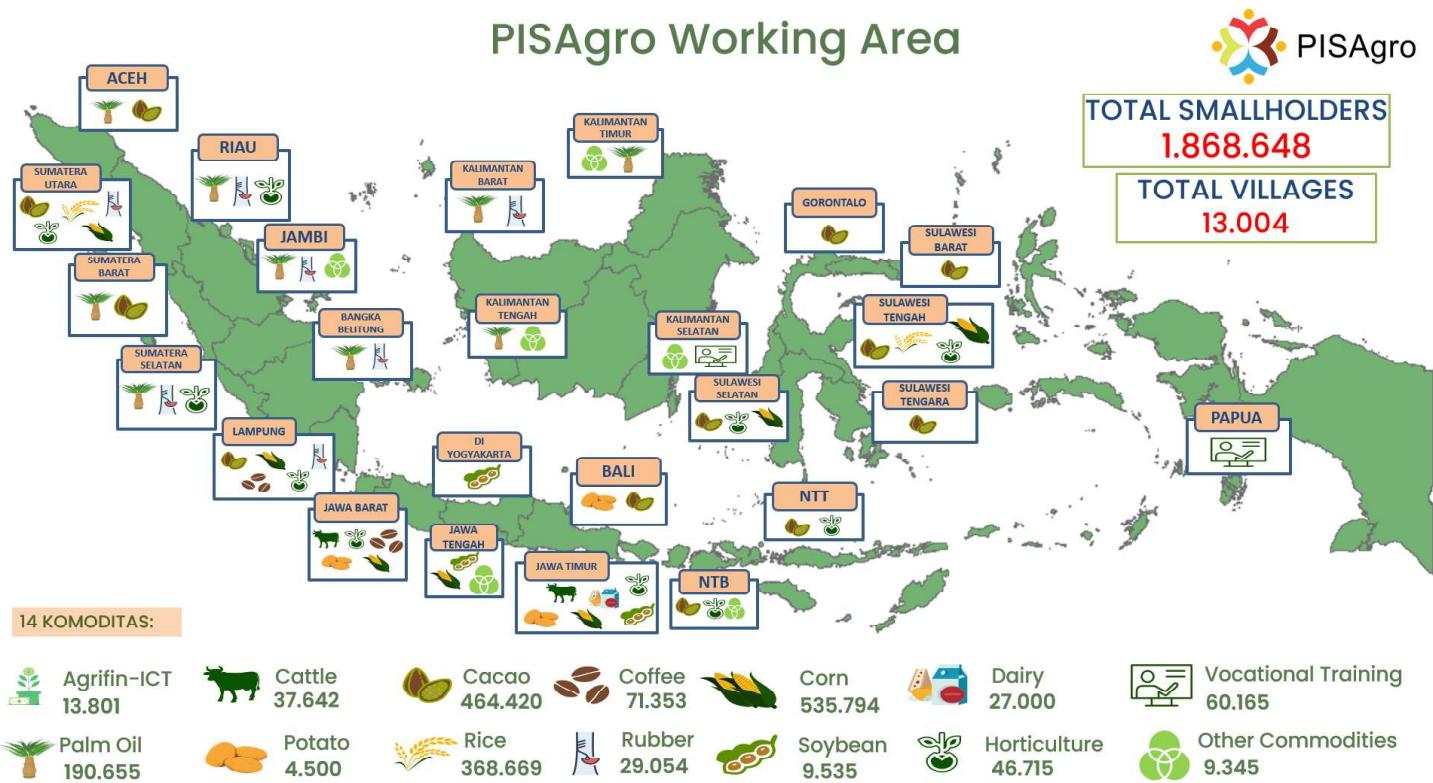
### Manajemen Karbon dan Gas Rumah Kaca

**6**    **6**    **4**  
kampanye    sosialisasi    pelatihan  
dilakukan 1 kali setiap tahunnya

# HIGHLIGHTS

## ACHIEVEMENT OF THE PISAGRO 2.0 DASHBOARD TO DATE - NOVEMBER 2022

(Written by: Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, and Sandra Pratiwi)



## PISAGRO 2.0 DASHBOARD



**37**  
villages

**12.727**  
smallholders

**16.464**  
ha of farm

# HIGHLIGHTS

## OVERVIEW



### GROWTH



### RESILIENCE



Type of activities conducted by company to increase smallholders' health condition quality:

<b>16</b> campaigns	<b>11</b> socializations	occurring 1-2 times a year
---------------------	--------------------------	----------------------------

### SUSTAINABILITY



of total land farm from palm oil companies are under implementation of land sustainable management  
6.787 out of 7.688 ha of land

Type of activities conducted by company to support smallholders implement management waste :

<b>35</b> campaigns	<b>30</b> socializations	<b>37</b> trainings	occurring 2-3 times a year
---------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

## GROWTH



### 21%

- 2.673 out of 12.727 of smallholders implemented Good Agricultural Practice (GAP) in their whole production process
- 2.132 smallholders implement Good Agricultural Practice in input-sourcing process
- 1.892 smallholders implement Good Agricultural Practice in post-harvest process
- 2.051 smallholders implement Good Agricultural Practice in farming operations process

Smallholders' average income per month in each commodities<sup>2</sup>:



3.0 Million IDR



6.0 Million IDR



2.5 Million IDR



3.5 Million IDR

<sup>1</sup> Good Agricultural Practice (GAP) is a guideline commonly used by smallholders to help them implement sustainability practice in agriculture and to ensure the product quality & safety

# HIGHLIGHTS

## RESILIENCE



at least

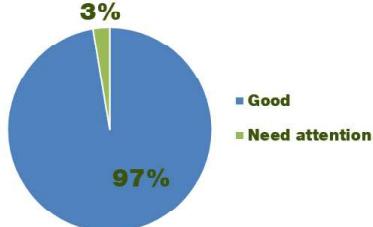
**1**

health facilities operated in each village supported by company (puskesmas, posyandu, hospital)

**24%**  
3.047 out of 12.727  
of smallholders  
implemented act of  
prevention on calamity

- 2.065 smallholders used adequate equipment and tools to prevent climate calamity occurrence
- 1.930 smallholders implemented agricultural practice to prevent fire calamity occurrence
- 2.895 smallholders implemented agricultural practice to prevent flood calamity occurrence

Smallholders' average health condition in each village<sup>2</sup>



Type of activities conducted by company to increase smallholders' health condition quality:

**16** campaigns  
**11** socializations  
occurring 1-2 times a year

<sup>2</sup> based on annual check-up conducted

## SUSTAINABILITY



**89%**

6.787 out of 7.688 ha of land  
of total land farm from palm oil  
companies are under implementation of  
land sustainable management

Activities conducted by company to support smallholders on implementing:

### Land Sustainable Management

**9** campaign socialization  
**9** training  
**8** occurring 1 times a year

### Biodiversity Management

**3** campaign socialization  
**2** training  
**3** occurring 1 times a year

### Waste Management

**35** campaign socialization  
**30** training  
**37** occurring 2-3 times a year

### GHG & Carbon Management

**6** campaign socialization  
**6** training  
**4** occurring 1 times a year



### **Indonesia Palm Oil Conference 2022**

November menjadi bulan dimana PISAgro berkesempatan menghadiri kegiatan-kegiatan besar yang cukup banyak, termasuk IPOC. Pada tanggal 2-4 November 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, berpartisipasi dalam *Indonesia Palm Oil Conference (IPOC)* 2022 yang bertajuk "New Landscape in World Vegetable Oil: Opportunities and Challenges for Palm Oil Industries" yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

Pada kesempatan ini, Direktur Eksekutif PISAgro bersama perwakilan lainnya dari berbagai pemangku kepentingan membahas mengenai prediksi harga CPO (crude palm oil) pada tahun 2023, beserta peningkatan permintaan minyak nabati dan inovasi untuk mendukung upaya minyak sawit berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas produk minyak sawit Indonesia di pasar global, dan juga tantangan ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa. Acara ini turut dihadiri oleh lebih dari 1.500 pebisnis dunia yang berasal dari 35 negara.



### **Sesi Webinar Forum Investasi B20 Indonesia “Kemajuan Regional pada Bisnis dan Investasi Berkelanjutan: Sektor Komoditas”**

Pada tanggal 11 November 2022, Sekretariat PISAgro menghadiri Forum Investasi B20 Indonesia dan menjadi salah satu pembicara dalam sesi webinar B20 Indonesia bertajuk "Regional Progress on Sustainable Business and Investment: Commodities Sector" yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Forum Investasi B20 merupakan bagian dari acara sampingan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) B20 Indonesia 2022.

Acara ini membahas tentang bisnis dan investasi berkelanjutan serta perkembangannya selama ini di berbagai daerah di Indonesia, dimana webinar ini dimoderatori oleh Gita Syahrani dari LTKL dan respon 'round-robin' telah dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional. Selain itu, Pedoman Investasi Berkelanjutan juga diluncurkan dan 18 MoU telah ditandatangani dalam forum ini.



## Konferensi Tingkat Tinggi B20 Indonesia 2022

Pada tanggal 13-14 November 2022, Sekretariat PISAgro menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi B20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

Rata-rata lebih dari 1.000 delegasi dari negara-negara G20 menghadiri konferensi ini, termasuk eksekutif dari perusahaan multinasional terkemuka, selain sekitar 3.000 peserta yang mewakili komunitas bisnis secara keseluruhan lebih dari 6,5 juta bisnis.

Pada konferensi ini, 25 rekomendasi kebijakan dan 68 aksi kebijakan telah dibuat dalam KTT ini.



## Peluncuran Panduan Investasi Lestari oleh Kementerian Investasi/BKPM dan Koalisi Ekonomi Membumi

Pada tanggal 14 November 2022, Kementerian Investasi/BKPM, didukung oleh Koalisi Ekonomi Membumi yang dimana PISAgro menjadi salah satu anggota pada koalisi tersebut, meluncurkan Panduan Investasi Lestari pada sela acara Konferensi Tingkat Tinggi B20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

Panduan Investasi Lestari sendiri disusun untuk memberikan panduan bagi pelaku bisnis besar dan kecil, serta calon investor untuk melakukan transformasi bisnis secara bertahap ke arah bisnis yang ramah sosial dan ramah lingkungan. Panduan ini juga dapat membantu Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi sesuai dengan *Nationally Determined Contributions* (NDC), serta emisi nol yang telah ditargetkan pada tahun 2060 mendatang.



## Forum “Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) on American and European Market”

Pada tanggal 23-25 November 2022, Sekretariat PISAgro berpartisipasi dalam “Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) in American and European Market Forum”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Pulau Belitung, Indonesia. Direktur Eksekutif kami, Insan Syafaat, menjadi moderator forum ini.

Acara ini membahas upaya diplomasi ekonomi untuk memperluas pasar Indonesia untuk komoditas minyak sawit berkelanjutan. Kegiatan juga bertujuan untuk memperkenalkan manfaat penerapan ISPO bagi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat setempat; memobilisasi dukungan dari sesama negara penghasil dalam diskusi internasional tentang peran minyak nabati untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); peningkatan penerimaan minyak sawit berkelanjutan (ISPO); serta menjajaki peluang untuk memperluas ekspor minyak sawit berkelanjutan di pasar non-tradisional.



## Perayaan 10 Tahun/1 Dekade Yayasan Rumah Energi (Rumah Energi)

Pada tanggal 25 November 2022, sekretariat PISAgro diundang dalam perayaan HUT ke-10 Yayasan Rumah Energi di TWS Dining, Jakarta Selatan. Pada acara ini, Sekretariat PISAgro yang diwakili oleh Hendri Surya W.

Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti sesi berbagi cerita dari pada pihak yang terlibat dalam perjalanan 10 tahun YRE, pemutaran video, pemotongan kue, serta kuis dan pembagian bingkisan. Acara ini juga dilakukan malam penggalangan donasi untuk para korban gempa di Cianjur.



## Lokakarya “Mobilizing Impact Capital for the Digital Transformation of MSMEs in Indonesia, Workshop and Stakeholder Engagement” oleh AVPN dan VISA

Pada tanggal 28 November 2022, sekretariat PISAgro mengikuti workshop “Mobilizing Impact Capital for the Digital Transformation of UMKM in Indonesia, Workshop and Stakeholder Engagement” yang diadakan oleh *Asian Venture Philantropy Network* (AVPN) dan VISA di Hotel JS Luwansa , Jakarta Selatan. Pada acara ini Sekretariat PISAgro yang diwakili oleh Insan Syafaat dan Hendri Surya W.

Pada kesempatan tersebut, workshop ini membahas tentang digitalisasi UMKM di antara seluruh pemangku kepentingan untuk memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk mendukung UMKM dalam ekonomi digital. Para peserta juga membahas berbagai program dan penawaran dari berbagai pemangku kepentingan dari sektor investasi swasta, publik, dan sosial, serta mengidentifikasi tantangan dan pemangku kepentingan yang penting untuk digitalisasi UMKM yang efektif di Indonesia.



## Audiensi dengan Grow Asia dan Deputi Maritim dan Sumber Daya Alam, Bappenas

Pada tanggal 29 November 2022, Sekretariat PISAgro mengadakan audiensi dengan perwakilan dari Grow Asia serta Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc, untuk penyusunan peluang kolaborasi antara PISAgro, Grow Asia, dan juga Kementerian PPN/Bappenas.

Bappenas, PISAgro dan Grow Asia, membuat catatan mereka mengenai peluang tersebut, serta baik PISAgro maupun Grow Asia menyatakan dukungan mereka untuk pencapaian TPB/SDGs melalui dashboard dan potensi dukungan finansial untuk hub pembiayaan TPB/SDGs.



## Pertemuan PISAgro dan Grow Asia dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Pada tanggal 30 November 2022, Grow Asia dan team (dipimpin oleh Ms. Beverley Postma, Direktur Eksekutif Grow Asia) dan tim dari PISAgro (dipimpin oleh Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro) mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Dr. Kasdi Subagyono) dan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (Dr. Ade Candradijaya) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk eksplorasi peluang kerjasama bidang pangan dan pertanian antara Grow Asia dan Kementerian Pertanian.

Ms Beverley pada awal pertemuan memperkenalkan Grow Asia dan menerangkan empat program unggulannya yaitu: *Agri-Food Innovation, Women's Economic Empowerment, Responsible Agricultural Investing* dan *Climate Change Adaptation and Resilience*.

Dr. Kasdi Subagyono menerangkan berbagai program yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Beliau juga menerangkan secara singkat hasil pertemuan Menteri Pertanian G20. Grow Asia, PISAgro, dan juga Kementerian Pertanian, sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan melaksanakan kerjasama pada program tertentu yang akan dibahas lebih lanjut pada Januari 2023.

# HIGHLIGHTS



## PISAgro



### Indonesia Palm Oil Conference 2022

November is the month when PISAgro has the opportunity to attend quite a number of major events, including the IPOC. On the 2nd-4th of November 2022, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, was invited to the Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2022 that titled "New Landscape in World Vegetable Oil: Opportunities and Challenges for Palm Oil Industries" which was held by the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) in Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

On this occasion, the Executive Director of PISAgro together with other representatives from various stakeholders discussed predictions of CPO (crude palm oil) prices in 2023, along with increasing demand for vegetable oils and innovations to support sustainable palm oil efforts to improve the quality of Indonesian palm oil products on the global market, as well as Indonesian palm oil product export challenges to the European Union. The event was also attended by more than 1,500 world business people from 35 countries.



### B20 Indonesia Investment Forum Webinar Session “Regional Progress on Sustainable Business and Investment: Commodities Sector”

On the 11th of November 2022, the PISAgro Secretariat, attended the B20 Investment Forum and became one of the speakers at the B20 Indonesia webinar session entitled “Regional Progress on Sustainable Business and Investment: Commodities Sector” which was held at the Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. B20 Investment Forum became part of the side event of B20 Indonesia Summit 2022.

This event discussed sustainable business and investment and its progress so far in various regions in Indonesia, where this webinar was moderated by Gita Syahrani from LTKL and the 'round-robin' response will be attended by various national and international stakeholders. Besides that, the Sustainable Investment Guidelines also launched in and 18 MoUs have been ratified in this forum.



## B20 Indonesia Summit 2022

On the 13th-14th of November 2022, the PISAgro Secretariat, attended the B20 Indonesia Summit which was held by the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia) at the Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

B20 is composed of an average of over 1 thousand delegates from G20 countries, including top executives from leading multinational corporations, besides around 3 thousand participants representing an overall business community of over 6.5 million businesses.

On this conference, 25 policy recommendations and 68 policy actions have been made in this summit.



## Launching of the Sustainable Investment Guide by the Ministry of Investment/BKPM and the Grounded Economy Coalition

On the 14th of November 2022, the Ministry of Investment/BKPM, supported by the Earthly Economic Coalition of which PISAgro is a member of the coalition, launched the Sustainable Investment Guide on the sidelines of the 2022 Indonesia B20 Summit organized by the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia) at the Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

The Lestari Investment Guide itself was developed to provide guidance for large and small business players, as well as potential investors to carry out a gradual business transformation towards a socially friendly and environmentally friendly business. This guide can also help Indonesia to achieve its emission reduction targets in accordance with the Nationally Determined Contributions (NDC), as well as zero emissions which have been targeted in 2060.



## Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) in American and European Market Forum

On the 23rd-25th of November 2022, the PISAgro Secretariat participated the “Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) in American and European Market Forum”, organised by the Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia at Belitung Island, Indonesia. Our Executive Director, Insan Syafaat, became a moderator of this forum.

This event discussed the economic diplomacy efforts to expand Indonesia's market for sustainable palm oil commodities. Activities also aim to introduce the benefits of ISPO implementation to the economic, social and environmental development of local communities; mobilize support from fellow producing countries in international discussions on the role of vegetable oil for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs); increasing acceptance of sustainable palm oil (ISPO); as well as exploring opportunities to expand exports of sustainable palm oil in non-traditional markets.

# SHIGHLIGHTS



## Celebration of the 10th Anniversary of Yayasan Rumah Energi (Rumah Energi)

On the 25th of November 2022, the PISAgro secretariat, was invited to the 10th Anniversary celebration of Yayasan Rumah Energi/Rumah Energi Foundation at TWS Dining, South Jakarta. On this event, PISAgro Secretariat represented by Hendri Surya W.

The event was filled with various activities such as story-sharing sessions from parties involved in YRE's 10-year journey, video screenings, cake cutting, as well as quizzes and door prizes. During this event, there was also a night to raise donations for the earthquake victims in Cianjur.



## "Mobilizing Impact Capital for the Digital Transformation of MSMEs in Indonesia, Workshop and Stakeholder Engagement" Workshop by AVPN and VISA

On the 28th of November, the PISAgro secretariat attended the workshop "Mobilizing Impact Capital for the Digital Transformation of MSMEs in Indonesia, Workshop and Stakeholder Engagement" held by the Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) and VISA at the JS Luwansa Hotel, South Jakarta. At this event the PISAgro Secretariat represented by Insan Syafaat and Hendri Surya W.

On this occasion, this workshop discussed the digitisation of MSMEs among all stakeholders to mobilize more resources to support MSMEs in the digital economy. The participants also discussed various programs and offers from various stakeholders from the private, public and social



## Lokakarya "Mobilizing Impact Capital for the Digital Transformation of MSMEs in Indonesia, Workshop and Stakeholder Engagement"

On the 28th of November, the PISAgro secretariat attended the workshop "Mobilizing Impact Capital for the Digital Transformation of MSMEs in Indonesia, Workshop and Stakeholder Engagement" held by the Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) and VISA at the JS Luwansa Hotel, South Jakarta. At this event the PISAgro Secretariat represented by Insan Syafaat and Hendri Surya W.

On this occasion, this workshop discussed the digitisation of MSMEs among all stakeholders to mobilize more resources to support MSMEs in the digital economy. The participants also discussed various programs and offers from various stakeholders from the private, public and social investment sectors, and identified challenges and stakeholders that are important for the effective digitization of MSMEs in Indonesia.



## PISAgro and Grow Asia Meeting with the Secretary General of the Ministry of Agriculture.

On the 30th of November 2022, Grow Asia and the team (led by Ms. Beverley Postma, Executive Director of Grow Asia) and the team from PISAgro (led by Insan Syafaat, Executive Director of PISAgro) held a meeting with the Secretary General of the Ministry of Agriculture (Dr. Kasdi Subagyono) and the Head of the Foreign Cooperation Bureau (Dr. Ade Candradijaya) at the Ministry of Agriculture Headquarters, Jakarta. This meeting aims to explore opportunities for cooperation in the food and agriculture sector between Grow Asia and the Ministry of Agriculture.

Ms Beverley at the beginning of the meeting introduced Grow Asia and explained its four flagship programmes: Agri-Food Innovation, Women's Economic Empowerment, Responsible Agricultural Investing and Climate Change Adaptation and Resilience.

Dr. Kasdi Subagyono explained the various programs currently being implemented by the Ministry of Agriculture, such as the Availability, Access and Consumption of Quality Food, the Value Added and Industrial Competitiveness Program and the Vocational Education and Training Program. He also briefly explained the results of the G20 Agriculture Ministers meeting. Grow Asia, PISAgro, and also the Ministry of Agriculture, agreed to follow up on the meeting by implementing cooperation on certain programs which will be discussed further in January 2023.

## KONFERENSI COP27 MENYOROTI TANTANGAN PERTANIAN DAN SOLUSINYA UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

(Disusun oleh Hendri Surya Widcaksana)



**Petani skala kecil dari negara-negara berkembang menghasilkan sepertiga dari makanan dunia, namun mereka hanya menerima 1,7 persen dari pendanaan iklim bahkan ketika mereka terpaksa menghadapi kekeringan, banjir, topan, dan bencana lainnya.**

Pada hari Sabtu, ratusan paviliun dan ruang konferensi di Sharm el-Sheikh berbunyi dengan sikap ini saat COP27 berfokus pada tantangan kritis adaptasi, pertanian, dan sistem pangan dalam konteks perubahan iklim.

"Kita harus membantu masyarakat pedesaan dalam mengembangkan daya tahan terhadap peristiwa cuaca buruk dan beradaptasi dengan perubahan iklim." Jika tidak, kita hanya akan berpindah dari satu krisis ke krisis berikutnya. "Dalam kondisi sulit, petani skala kecil bekerja keras menanam makanan untuk kami," kata Sabrina Dhowre Elba, Duta Niat Baik untuk Dana Internasional PBB untuk

Pembangunan Pertanian (IFAD), dalam sebuah konferensi pers.

Ms Dhowre Elba, seorang wanita Somalia, mengatakan ini adalah keprihatinan pribadi baginya: sebagai COP27 dimulai, negaranya telah mengalami empat musim hujan yang gagal berturut-turut, kejadian iklim yang tidak terlihat dalam 40 tahun.

"Saya tidak tahan melihat perempuan, keluarga, dan petani menderita di seluruh Tanduk Afrika karena menderita kekeringan terburuk dalam ingatan baru-baru ini," katanya, memohon negara-negara kaya untuk mengatur kemauan politik dan investasi.

"Jutaan dolar telah dialokasikan untuk memerangi wabah COVID-19 dan dampak ekonominya." Perubahan iklim membutuhkan hal yang sama. Hal yang sama diperlukan untuk bantuan pertanian jangka panjang. Ini penting untuk kesejahteraan kolektif dan ketahanan pangan kita," lanjutnya.

## Dana adaptasi harus disediakan.

Menurut Dina Saleh, Direktur Regional IFAD, kegagalan dalam membantu masyarakat pedesaan dalam beradaptasi dapat menimbulkan implikasi bencana, termasuk kemiskinan yang berkepanjangan, migrasi, dan kekerasan.

"Inilah sebabnya, hari ini, kami menyerukan kepada para pemimpin dunia dari negara-negara kaya untuk menepati janji mereka memberikan \$100 miliar per tahun dalam pembiayaan iklim ke negara-negara berkembang, dengan setengah dari jumlah itu didedikasikan untuk adaptasi iklim," katanya.

Tiga belas tahun lalu, pada COP15 di Kopenhagen, negara-negara kaya membuat komitmen yang substansial. Mereka berjanji untuk menyalurkan \$100 miliar per tahun ke negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020 untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi lonjakan suhu tambahan. Namun, janji itu tidak ditepati.

Ms Saleh memperingatkan bahwa ada "jendela terbatas" untuk membantu masyarakat miskin pedesaan dalam bertahan hidup dan melindungi komunitas mereka, dan bahwa hasil pangan mungkin turun hingga 50% pada akhir abad ini.

## Sebuah proyek baru

Untuk mengatasi masalah ini, Kepresidenan COP27 Mesir meluncurkan inisiatif baru Pangan dan Pertanian untuk Transformasi Berkelanjutan, atau FAST, pada hari Jumat, dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas kontribusi pendanaan iklim untuk mengubah sistem pertanian dan pangan pada tahun 2030.

Program kerja sama akan mencakup hasil nyata yang akan membantu negara-negara mendapatkan akses ke pendanaan dan investasi iklim, meningkatkan keahlian, dan memberikan bantuan dan diskusi kebijakan.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, akan memfasilitasi proyek ini, yang menurut Zitouni Ould-Dada, Wakil Direktur Divisi Iklim dan Lingkungan FAO, menempatkan pertanian sebagai pusat upaya memerangi perubahan iklim.

"Pesannya adalah pertanian harus menjadi

komponen intrinsik dari solusi perubahan iklim," katanya.

## Pentingnya berinvestasi dalam inovasi

Pada saat yang sama, sementara sektor pertanian dan pangan sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim, itu juga menyumbang sekitar sepertiga dari emisi rumah kaca global, dari produksi hingga konsumsi, jelas Bapak Ould-Dada, mengatakan bahwa harus ada transformasi dari sistem pertanian pangan.

"Kita tidak dapat melanjutkan model produksi makanan saat ini dan kemudian merusak tanah, menurunkan keanekaragaman hayati, mempengaruhi lingkungan. Tidak. Itu harus berkelanjutan," catatnya.

Pakar menyoroti bahwa jika pilihan yang tepat dibuat, pertanian dapat menjadi bagian penting dari solusi untuk melawan krisis iklim dengan menyerap karbon di tanah dan tanaman serta mempromosikan adaptasi dan ketahanan.

"Kita tidak dapat menghasilkan makanan untuk memberi makan dan memelihara populasi yang terus bertambah dengan model saat ini, dengan ancaman perubahan iklim. Kami tidak bisa."

Hal pertama yang harus ditangani dunia, katanya, adalah mengatasi limbah makanan, yang bertanggung jawab atas 8 persen emisi gas global.

"Kami memiliki sekitar 828 juta orang yang kelaparan setiap hari. Namun, kita membuang sepertiga dari makanan yang kita hasilkan untuk konsumsi manusia. Kita perlu mengubah pola pikir kita, model produksi kita, agar kita tidak kehilangan dan menyia-nyiakan makanan," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa dalam hal solusi, memanfaatkan kekuatan inovasi sangat penting untuk mengurangi emisi, membantu menyesuaikan pertanian dengan perubahan iklim, dan membuatnya lebih tahan terhadap kesulitan, tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim, tetapi juga oleh pandemi atau perang, seperti sebagai situasi saat ini di Ukraina.

"Inovasi dalam arti luas seperti pertanian presisi di mana Anda memiliki irigasi tetes yang dikombinasikan dengan energi terbarukan sehingga Anda memiliki efisiensi. Tapi juga, inovasi yang

memanfaatkan pengetahuan tradisional petani kecil juga penting, karena ini terjadi setiap saat," tegas Bapak Ould-Dada.

### Panggilan masyarakat sipil terkait keuangan, transformasi ekonomi

Perwakilan PBB bukan satu-satunya yang menggarisbawahi perlunya negara-negara untuk berinvestasi dalam transformasi dan mewujudkan janji pendanaan iklim mereka.

Protes besar-besaran yang dipimpin oleh koalisi organisasi lingkungan, perempuan, adat, pemuda dan serikat pekerja mengambil alih jalan dan jalur antara paviliun di COP27.

"Hak atas wilayah, hak atas sumber daya, hak asasi manusia, hak masyarakat adat, kehilangan dan kerusakan harus ada dalam semua teks negosiasi.... 1.5 tidak dapat dinegosiasikan, itulah yang kami perjuangkan di sini," kata Hindou Oumarou Ibrahim, aktivis lingkungan Chad dan advokat SDG.

Aktivis tersebut menyatakan bahwa rakyatnya sekarat karena banjir, kekeringan, sementara beberapa komunitas adat di Pasifik kehilangan tanah airnya.

"Kami ingin mendapatkan keadilan. Keadilan untuk rakyat kita, untuk ekonomi kita atas kerugian dan kerusakan. Kami kehilangan budaya kami, identitas kami, hidup kami, dan ini tidak dapat dibayarkan, tetapi pendanaan iklim harus diberikan," teriaknya di tengah ratusan pengunjuk rasa.

### AS mengatakan siap untuk mendukung

Kemudian pada hari Sabtu, John Kerry, Utusan Khusus AS untuk Aksi Iklim, mengatakan pada konferensi pers bahwa negaranya "sangat mendukung" dorongan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan yang merupakan masalah paling sulit sejauh ini dalam negosiasi COP27.

"Kami telah terlibat dengan teman-teman kami untuk mengerjakan proposal," tambahnya, menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden, yang dipanggil oleh LSM pada hari Jumat karena tidak menyebutkan kerugian dan kerusakan dalam pidatonya di COP27, juga mendukung langkah tersebut.

Kelompok negosiasi 77 dan China, yang pada dasarnya mencakup semua negara berkembang, untuk pertama kalinya dapat memasukkan masalah ini ke dalam agenda COP tahun ini.

Idenya adalah untuk menciptakan kerugian dan kerusakan fasilitas keuangan yang dapat memberikan kompensasi uang kepada negara-negara yang paling terkena dampak perubahan iklim, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih kecil untuk emisi rumah kaca.

**Informasi lebih lanjut dapat dilihat di halaman acara khusus COP27 di situs web Perserikatan Bangsa-bangsa, di mana Anda dapat menemukan semua liputan tentang KTT iklim COP27, termasuk cerita dan video, penjelasan, siniar, dan buletin harian kami.**

Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa



## COP27 HIGHLIGHTS THE AGRICULTURAL CHALLENGES AND ITS SOLUTIONS IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE

(Written by Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



***Small-scale farmers from developing countries produce one-third of the world's food, yet they only receive 1.7 per cent of climate finance even as they are forced to cope with droughts, floods, cyclones and other disasters.***

On Saturday, hundreds of pavilions and conference rooms in Sharm el-Sheikh rang with this attitude as COP27 focused on the critical challenges of adaptation, agriculture, and food systems in the context of climate change.

"We must assist rural communities in developing resistance to harsh weather events and adapting to a changing climate." Otherwise, we will simply move from one crisis to the next. "In difficult conditions, small-scale farmers work hard to grow food for us," Sabrina Dhowre Elba, Goodwill Ambassador for the UN International Fund for Agricultural Development (IFAD), stated during a news conference.

Ms. Dhowre Elba, a Somali lady, said this was a

personal concern for her: as COP27 began, her nation had seen four consecutive failed rainy seasons, a climate occurrence not seen in 40 years.

"I can't stand by as women, families, and farmers suffer across the Horn of Africa as it suffers from its worst drought in recent memory," she stated, imploring rich nations to marshal political will and investment.

"Millions of dollars have been allocated to combat the COVID-19 outbreak and its economic effects." Climate change requires the same. The same is required for long-term agricultural assistance. It's critical to our collective well-being and food security," she continued.

### **Adaptation funds must be made available.**

According to Dina Saleh, Regional Director of IFAD, failing to assist rural communities in adapting might have catastrophic implications, including prolonged poverty, migration, and violence.

"This is why, today, we are calling on world leaders from affluent countries to honour their promise to deliver \$100 billion per year in climate finance to developing countries, with half of that amount dedicated to climate adaptation," she said.

Thirteen years ago, at COP15 in Copenhagen, wealthy countries made a substantial commitment. They vowed to channel \$100 billion per year to less-developed countries by 2020 to assist them in adapting to climate change and mitigating additional temperature spikes. However, that promise was not honoured.

Ms. Saleh warned that there is a "limited window" to assist rural poor people in surviving and protecting their communities, and that food yields might drop by up to 50% by the end of the century.

### A brand-new project

To address these concerns, the Egyptian Presidency of the COP27 launched the new initiative Food and Agriculture for Sustainable Transformation, or FAST, on Friday, with the goal of increasing the quantity and quality of climate finance contributions to transform agriculture and food systems by 2030.

The cooperation programme will include real deliverables that will assist nations in gaining access to climate funding and investment, increasing expertise, and providing policy assistance and conversation.

The UN Food and Agriculture Organization (FAO), in collaboration with other UN agencies, will facilitate this project, which, according to Zitouni Ould-Dada, Deputy Director of the FAO's Climate and Environment Division, places agriculture at the centre of efforts to combat climate change.

"The message is that agriculture must be an intrinsic component of the solution to the climate change," he told.

### The importance of investing in innovation

At the same time, while the agricultural and food sector is profoundly impacted by climate change, it also contributes around a third of global greenhouse emissions, from production to consumption, Mr. Ould-Dada explains, saying that there must be a transformation of the agri-food systems.

"We can't continue with the current model of

producing food and then degrading the soil, declining biodiversity, affecting the environment. No. It must be sustainable," he notes.

The expert highlights that if the right choices are made, agriculture can be an important part of the solution to fight the climate crisis by sequestering carbon in soil and plants and promoting adaptation and resilience.

"We can't produce the food to feed and nourish a growing population with the current model, with the threat of climate change. We can't."

The first thing the world should be tackling, he says, is addressing food waste, which is responsible for 8 per cent of global gas emissions.

"We have around 828 million people who go hungry every day. And yet, we throw away a third of the food that we produce for human consumption. We need to change our mindset, our production model, so that we don't lose and waste food," he underscores.

He adds that in terms of solutions, harnessing the power of innovation is crucial to reduce emissions, helping adapt agriculture to a changing climate, and making it more resistant against adversity, not only caused by climate change, but also by pandemics or war, such as the current situation in Ukraine.

"Innovation in the broader sense like precision farming where you have drip irrigation combined with renewable energy so that you have efficiency. But also, innovation harnessing traditional knowledge of smallholder farmers is also important, because it is happening all the time," Mr. Ould-Dada emphasized.

### Civil society calls for finance, economy transformation

UN representatives were not the only ones underscoring the need for countries to invest in transformation and deliver their climate finance promise.

A massive protest led by a coalition of environmental, women, indigenous, youth and trade union organizations took over the roads and pathways between the pavilions at COP27.

"Right to territories, rights to resources, human rights, indigenous people rights, loss and damage must be in all the negotiation texts.... 1.5 is not negotiable that is what we are here standing for,"

said Hindou Oumarou Ibrahim, Chadian environmentalist and SDG advocate.

The activist stated that her people are dying because of floods, droughts, while some indigenous communities in the Pacific are losing their homelands.

"We want to have justice. Justice for our people, for our economies for loss and damage. We are losing our culture, our identity, our life, and these are not payable, but climate finance needs to be delivered," she shouted amid hundreds of protesters.

#### US says its ready to support

Later on Saturday, John Kerry, US Special Envoy for Climate Action, told a press conference that his country is "totally supportive" of the push to address loss and damage, the thorniest issue so far in the COP27 negotiations.

"We have engaged with our friends to work through the proposals," he added, stressing that US President Joe Biden, who NGOs called out on Friday for not mentioning loss and damage in his speech at COP27, is also supportive of the move.

The negotiation group of the 77 and China, which basically includes all of the developing countries, was for the first time able to put the issue on a COP agenda this year.

The idea is to create a loss and damage financial facility that can provide monetary compensation to the nations most affected by climate change, but with less responsibility for greenhouse emissions.

More information can be found on the COP27 special events page on the United Nations website, where you can find all the coverage of the COP27 climate summit, including stories and videos, briefings, podcasts and our daily newsletter.

Source: United Nations



## BERBAGAI INISIATIF KEBIJAKAN DISIAPKAN OLEH G20 SEBAGAI RESPON TERHADAP KETAHANAN PANGAN GLOBAL

(Disusun oleh Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Oleh karena itu, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama dan pulih menjadi lebih kuat. Krisis pangan global memang menjadi salah satu perhatian negara-negara anggota G20. Secara khusus, para menteri keuangan dan menteri pertanian G20 sudah bertemu di ajang *Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting* (JFAMM) yang digelar pada 11 Oktober 2022 lalu di Washington DC.

JFAMM sendiri adalah kolaborasi negara G20 di jalur keuangan dan jalur sherpa. Kolaborasi ini ditujukan untuk membahas perkembangan global terkini. Salah satunya kerawanan pangan global. Pertemuan JFAMM membahas empat poin. Pertama, membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Kedua, mendukung secara politis bagi pemetaan, penyusunan kerangka acuan dan tindakan konkret yang akan diambil untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Ketiga, menjajaki aksi konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang sudah mendesak. Keempat, mempertimbangkan koordinasi bidang keuangan dan pertanian dalam jangka panjang.

Indonesia berharap keempat poin tersebut bisa dijadikan komitmen bersama bagi negara-negara anggota G20 sebagai solusi persoalan pangan dunia. Apalagi pangan adalah persoalan hak asasi dan semua orang berhak punya akses yang sama mendapatkan pangan.

### Masalah Lonjakan Harga Pupuk

Melonjaknya harga pupuk global juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan JFAMM tersebut. Persoalan lonjakan harga pupuk ini menjadi concern hampir seluruh negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Antara lain Amerika Serikat, China, India, Kanada. Pembahasan juga melibatkan lembaga internasional lainnya, seperti World Bank Group, Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF), dan World Trade Organization (WTO).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pertemuan JFAMM G20 tersebut menghasilkan komitmen para menteri keuangan dan menteri pertanian G20 membentuk skema pendanaan global untuk penanganan tiga isu prioritas sektor pertanian dan pangan. Tiga isu ini antara lain, Pertama, sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi semua. Ketiga, mempromosikan kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan.

Syahrul menjelaskan, dinamika geopolitik internasional, terutama perang Rusia-Ukraina menjadi penyebab tingginya harga bahan pupuk dunia. Kondisi ini berdampak meningkatnya harga pupuk di tingkat nasional maupun global, sehingga memicu lonjakan harga pangan.

Permasalahan ketahanan pangan ini memang telah menjadi perhatian serius forum G20. Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. "G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif

lain," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

### Inisiatif Hadapi Masalah Ketahanan Pangan

Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan. Misal, the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan US\$ 30 juta dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System.

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan (policy tools) dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan. Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut, sebagai sebuah forum yang efektif dalam menjawab tantangan global dalam hal kerawanan pangan, Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan.

"Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing," terang Syahrul.

Nah, pertemuan antar negara G20 yang

berlangsung pada 2022 dipandang memegang peranan penting untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang terus meningkat. Presidensi G20 Indonesia menjadi ajang dialog, kerja sama dan koordinasi respon kebijakan antarnegara untuk mendorong pemulihan dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat dan seimbang, di tengah-tengah guncangan dan tantangan yang dihadapi.

Info terkini tentang G20 kunjungi [g20.org](http://g20.org)



# G20 INDONESIA STORY

## VARIOUS POLICY INITIATIVES PREPARED BY THE G20 AS A RESPONSE TO THE GLOBAL FOOD SECURITY

(Written by Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Indonesia's G20 presidency in 2022 will be the most crucial period in the global economic recovery process. Therefore, global collaboration through the G20 Forum must be able to produce concrete steps and major breakthroughs to overcome the current global food, energy and financial crises, as well as accelerate joint recovery and make a stronger recovery. The global food crisis has indeed become one of the concerns of the G20 member countries. In particular, the G20 finance ministers and agriculture ministers met at the Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM) which was held on 11 October 2022 in Washington DC.

JFAMM itself is a G20 country collaboration in the finance channel and the Sherpa channel. This collaboration is intended to discuss the latest global developments. One of them is global food insecurity.

The JFAMM meeting discussed four points. First, building on the efforts of G20 members to address food and nutrition insecurity. Second, political support for mapping, drafting of terms of reference and concrete actions to be taken to address food and nutrition insecurity. Third, exploring concrete actions to overcome the urgent crisis in the availability of fertilizers and

food insecurity. Fourth, consider the coordination of finance and agriculture in the long term.

Indonesia hopes that these four points can become a joint commitment for G20 member countries as a solution to the world food problem. Moreover, food is a matter of human rights and everyone has the right to have equal access to food.

#### **The Problem of Fertiliser Price Surge**

The soaring global fertilizer prices were also one of the discussions at the JFAMM meeting. The issue of the surge in fertiliser prices has become a concern for almost all the countries involved in the meeting. These include the United States, China, India, Canada. The discussion also involved other international institutions, such as the World Bank Group, Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF), and World Trade Organization (WTO).

Minister of Agriculture Syahrul Yasin Limpo said the JFAMM G20 meeting resulted in the commitment of the G20 finance ministers and agriculture ministers to form a global funding scheme for handling three priority issues in the agriculture and food sectors.

These three issues include, First, a resilient and sustainable agricultural and food system. Second, agricultural trade that is open, fair, predictable, transparent and non-discriminatory to ensure food availability and affordability for all. Third, promoting innovative agricultural entrepreneurship through digital agriculture to improve the livelihoods of rural farmers.

Syahrul explained that international geopolitical dynamics, especially the Russia-Ukraine war, were the cause of the high world price of fertilizers. This condition resulted in an increase in fertilizer prices at the national and global levels, thus triggering a spike in food prices.

The issue of food security has indeed become a serious concern of the G20 forum. Indonesia's G20 presidency has reaffirmed its commitment to using all appropriate policy tools to address current economic and financial challenges,

including the risk of food insecurity. "The G20 is ready to take fast collective action on food security and nutrition, including by collaborating with other initiatives," said Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati.

#### **Initiatives to Address Food Security Issues**

Several global initiatives have been launched by regional, international organizations, and even independently by several countries to deal with food security issues. For example, the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), the International Finance Institutions Action Plan, and the Global Development Initiative.

In addition, the World Bank has committed to providing US\$ 30 million in new or existing funding for projects related to food security and nutrition over the next several years. The Food and Agriculture Organization (FAO) also provides developments in food market conditions, including through the G20 Agricultural Market Information System.

The G20 Ministers of Finance and Ministers of Agriculture have reaffirmed their commitment to utilize all policy tools in addressing current economic and financial challenges, including food security. The G20 Forum will continue to take rapid joint steps in addressing issues of food security and nutrition, including by collaborating with other initiatives.

Minister of Agriculture Syahrul Yasin Limpo said, as an effective forum in responding to global challenges in terms of food insecurity, the Indonesian G20 Presidency implemented a strategy to increase production capacity to stabilize food prices, reduce inflation, reduce imports and increase food exports.

"This strategy is applied to several strategic food commodities with operational activities to overcome problems that arise in the food agribusiness system, in order to achieve efficiency and increase competitiveness," explained Syahrul.

So, the meeting between the G20 countries which will take place in 2022 is seen as playing an important role in solving the increasing

challenges of the global economy. Indonesia's G20 presidency is an arena for dialogue, cooperation and coordination of policy responses between countries to encourage recovery and maintain strong and balanced economic growth, amidst the shocks and challenges they face.

For the latest information about the G20, visit [g20.org](http://g20.org)



## KOMITMEN PARA MENTERI PERTANIAN NEGARA ANGGOTA G20 UNTUK KETAHANAN PANGAN GLOBAL

(Disusun oleh Ferial Lubis, PISAgro, berdasarkan dokumen *Chair's Summary G20 Agriculture Ministers' Meeting "Balancing Food Production and Trade to Fulfil Food for All"*)

Sepanjang tahun 2022 dimana Indonesia sebagai Presidensi Grup 20 (G20), pembahasan sektor pertanian oleh para Menteri Pertanian negara-negara G20 menjadi suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kebutuhan ketersediaan pangan secara global.

Para anggota G20 mencatat bahwa sejak tahun 2020, risiko terhadap ketahanan pangan dan gizi di seluruh dunia telah meningkat karena berbagai faktor, antara lain pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengaruh peristiwa cuaca ekstrem, dampak perang Rusia – Ukraina yang memperburuk kerawanan pangan global. Dunia berada di tengah-tengah krisis ketahanan pangan dan nutrisi global yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat mengancam pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Bank Dunia melaporkan bahwa akan ada penambahan antara 75 juta - 95 juta orang yang akan hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 dan 255 juta orang kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19. The State of Food Security and Nutrition in the World Report 2022 memperkirakan pandemi Covid-19 telah meningkatkan kekurangan gizi kronis pada 150 juta orang sejak 2019, dan antara 702 dan 828 juta orang di dunia terkena dampak kelaparan pada tahun 2021 dan sekitar 670 juta orang diperkirakan akan menghadapi kelaparan pada tahun 2030.

Para Menteri Pertanian G20 yang bertemu di Denpasar, Bali pada 28 September 2022, telah sepakat dengan beberapa konsensus sebagai berikut:

a. Terus mendukung sektor pertanian dan penduduk pedesaan dalam mengelola pertanian dan sistem pangan secara berkelanjutan dan menggarisbawahi pentingnya menangani krisis pangan secara berkelanjutan

dan secara tegas mengatasi semua krisis yang ada dengan intensitas yang setara;

b. Berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi diantara anggota G20 dan bekerjasama dengan organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra lainnya, untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, dan bekerja untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan siapa pun.

c. Akan mempromosikan: (1) Sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, (2) Perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan tidak diskriminatif guna memperluas ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua, dan (3) Agripreneurship yang inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan.

Ketiga konsep tersebut diuraikan dalam bentuk komitmen Menteri Pertanian G20 sebagai berikut:

### **I. Sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.**

1. Menyoroti pentingnya mempercepat transformasi sistem pertanian dan pangan yang berkelanjutan agar menjadi lebih tangguh dan memiliki kemampuan menahan goncangan dan tekanan, berjuang untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan cara yang konsisten dengan upaya berkelanjutan untuk mencapai the Sustainable Development Goals (SDGs). Menyadari bahwa pertanian dan keanekaragaman hayati sangat terkait dan mengakui sangat penting untuk menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati. Menyoroti bahwa diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang berbasis sumber pangan lokal merupakan salah satu cara untuk memperkuat

keberlanjutan dan ketahanan sistem pertanian dan pangan lokal, regional, dan global;

2. Pendanaan berkelanjutan, investasi yang ditargetkan dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pangan jangka panjang, keamanan dan gizi, termasuk realisasi progresif hak atas pangan yang layak dalam konteks ketahanan pangan nasional. Menyerukan kepada the G20 Meeting of Agricultural Chief Scientist (MACS), the Food and Agriculture Organisation (FAO), the Organisation for Economic Co-operation Development (OECD), dan lembaga lain untuk meningkatkan upaya berbagi informasi, bimbingan teknis, dan inisiatif yang dapat membantu petani meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan;

3. Berkomitmen untuk mengurangi limbah pangan secara global hingga setengah per kapita pada tingkat ritel dan konsumen pada tahun 2030 dan mengurangi kerugian pangan selama proses produksi dan rantai pasok. Namun disadari masih ada kekurangan data tentang kehilangan pangan dan limbah di tingkat negara dan pedoman yang digunakan belum diselaraskan, maka disepakati untuk mengintensifkan upaya pengumpulan data yang relevan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti nyata, termasuk untuk lebih membagikan praktik terbaik melalui the Technical Platform on the Measurement and Reduction of Food Loss and Waste (FLW). Disadari bahwa mengurangi FLW membutuhkan tindakan dan solusi pengambilan keputusan bersama, maka mendukung kegiatan FAO dan The United Nations Environment Programme (UNEP), serta organisasi internasional terkait lainnya, seperti OECD, the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), sektor swasta, dan Civil Society Organizations (CSOs) termasuk implementasi dari the FAO Voluntary Code of Conduct for FLW Reduction dan prakarsa terkait dari the UN Food Systems Summit (UNFSS);

4. Diyakini bahwa terdapat peran penting perempuan, pemuda, masyarakat adat, pedesaan dan masyarakat lokal yang berkontribusi pada sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, juga diakui peran penting keluarga dan pertanian skala kecil dalam mencapai pertanian

berkelanjutan dan sistem pangan. Berkomitmen untuk mempromosikan peluang diversifikasi ekonomi di sepanjang rantai nilai pangan bagi kelompok-kelompok ini untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, antara lain melalui pelatihan khusus dan program peningkatan kapasitas. Menyambut baik kerja kolaboratif untuk memperkuat peran kelompok-kelompok ini melalui pendekatan multi pemangku kepentingan yang inklusif di Committee on World Food Security (CFS);

5. Mengakui kontribusi penting dari UMKM pertanian dan pangan terhadap ketangguhan, berkelanjutan, dan pertumbuhan inklusif, khususnya dalam rangka pemulihian ekonomi pasca pandemi Covid-19. Terdapat kebutuhan yang signifikan untuk catalytic investments (investasi yang akan mendorong investasi lebih banyak dan lebih besar di bidang serupa) sejalan dengan the CFS Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems (CFS-RAI) guna mendukung ketersediaan dan aksesibilitas keuangan, bagi petani skala kecil, nelayan, peternak dan UMKM. Diharapkan sektor publik bekerja berdampingan dengan UMKM sektor pertanian dan pangan sehingga dapat mendukung nilai resiko bisnis dan mendorong investasi di seluruh system pertanian dan pangan. Mendukung upaya untuk meningkatkan aksesibilitas beragam instrumen pembiayaan, termasuk model keuangan campuran, terutama di daerah pedesaan;

6. Menegaskan kembali komitmennya untuk menerapkan pendekatan One Health (Kesehatan Terpadu) guna mempercepat perang global melawan Antimicrobial Resistance (AMR) dalam sistem pertanian dan pangan dan untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola ancaman biologis dan risiko terhadap pertanian dan ketahanan pangan. Mengakui dan mendorong karya Quadripartite organisasi untuk memperkuat penerapan pendekatan One Health guna memerangi AMR dalam mengurangi risiko munculnya penyakit zoonosis dengan potensi pandemi dan ancaman lain terhadap keamanan kesehatan masyarakat global. Mendukung the One Health High-Level Expert Panel yang dibentuk oleh FAO, the World Organisation for Animal Health (WOAH), UNEP, and the World

Health Organization (WHO), dan mendorong organisasi Quadripartite untuk menyelesaikan One Health Joint Action Plan pertamanya. Menyambut adopsi Codex Alimentarius "Guidelines on Integrated Monitoring and Surveillance of Foodborne AMR" and the "Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne AMR" sebagai alat penting untuk mengatasi AMR sejalan dengan the One Health Approach dan komitmennya untuk penggunaan agen antimikroba. Menteri Pertanian G20 menerapkan amandemen "Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne AMR";

7. Dalam rangka memperkuat sistem kesehatan hewan dan tumbuhan untuk mengurangi risiko dan penyebaran AMR, berjangkitnya penyakit menular (EIDs), dan membuat ekosistem pendukung zoonosis yang tangguh, disepakati mendukung organisasi Quadripartite untuk pelaksanaan yang berkelanjutan dan ambisius 2015 Global Action Plan serta berkonsultasi dengan Negara Anggota the One Health Joint Plan of Action (2022-2026) tentang rencana pelaksanaannya. Juga memberikan dorongan terhadap the International Plant Protection Convention ( IPPC ) untuk melanjutkan pemantauan dan berpartisipasi dalam diskusi FAO One Health dan untuk mengevaluasi informasi tentang penggunaan antimikroba pada tanaman atau tumbuhan untuk tujuan fitosanitasi dalam ruang lingkup the Convention. Bekerja sama dengan IPPC guna mendorong penguatan forum regional dan internasional untuk menemukan solusi yang diperlukan guna memastikan kesehatan tanaman;

8. Mempertimbangkan kerentanan pertanian dan sistem pangan terhadap perubahan iklim dan memperhatikan the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Paris Agreement, dan hasil yang relevan serta kesimpulan dari the UNFCCC Conference of the Parties (COP) the Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA), maka perlu diperhatikan prioritas mendasar menjaga keamanan pangan dan pentingnya adaptasi dan mitigasi untuk pertanian yang tahan iklim. Menghargai inisiatif yang diluncurkan pada COP26 dan COP sebelumnya. Mencatat pentingnya kerjasama yang saling menguntungkan di bidang teknologi, capacity

building, berinvestasi lebih banyak dalam penelitian, pengembangan dan praktik teknologi tahan iklim, dan identifikasi peluang pendanaan yang ada serta insentif skema, alat, dan berbagi pengetahuan dengan persyaratan yang disepakati bersama untuk pelaksanaan tindakan tersebut antara lain melalui keterlibatan aktif dengan UNFCCC dan inisiatif relevan lainnya. Menyadari bahwa meneruskan dan membangun warisan praktik pertanian yang baik yang melibatkan penduduk asli dan komunitas lokal sangat penting untuk adaptasi iklim sistem pertanian, mitigasi, dan pembangunan berkelanjutan.

## **II. Perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan tidak diskriminatif guna memperluas ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua.**

9. Menggarisbawahi pentingnya memperkuat aturan dasar, terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, tidak diskriminatif, inklusif, setara, dan searah dengan sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan yaitu the World Trade Organization (WTO) sebagai intinya. Hal ini akan meningkatkan prediktabilitas pasar, meminimalkan distorsi, meningkatkan kepercayaan bisnis, dan membolehkan perdagangan pertanian dan pangan mengalir dengan lancar. Menyambut kemajuan yang dibuat oleh Anggota WTO di Ministerial Conference ke-12 tentang masalah ketahanan pangan. Mendukung hasil the WTO Ministerial Declaration on Emergency Response to Food Insecurity, yang menekankan kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan fungsi dan ketahanan pangan dan pertanian jangka panjang di pasar global, dan menggarisbawahi untuk tidak melakukan larangan atau pembatasan ekspor dengan cara tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Menekankan ketetapan the WTO Ministers' Decision bahwa Anggota tidak boleh memberlakukan larangan atau pembatasan pembelian bahan pangan yang bertujuan untuk tujuan kemanusiaan non-komersial oleh World Food Program (WFP);

10. Berkomitmen untuk bekerja secara konstruktif dengan Anggota WTO lainnya terutama untuk memperkuat perdagangan

pangan global dan memenuhi kewajiban sebagai anggota WTO. Terus menghindari tindakan pembatasan atau distorsi yang tidak dapat dibenarkan yang mengarah pada gejolak harga pangan dan pupuk di pasar internasional yang mengancam pada pemulihan rantai pasok pangan global dan secara lebih luas pada ketahanan pangan dan nutrisi, khususnya untuk sebagian besar daerah rentan;

11. Menggarisbawahi langkah-langkah darurat yang dirancang untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang harus tepat sasaran, proporsional, transparan, dan sementara; bahwa hal tersebut tidak boleh menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu atau gangguan terhadap rantai pasok pangan global; dan konsisten dengan aturan WTO. Menghargai tanggapan pemerintah untuk menghindari tindakan pembatasan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan;

12. Mengakui kontribusi penting dari the Agriculture Market Information System (AMIS) dan the Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring (GEOGLAM) untuk meningkatkan transparansi dan mendukung respon kebijakan terkoordinasi untuk ketahanan pangan dan gizi melalui pemantauan harga yang terperinci dan ketersediaan tanaman tertentu dan pupuk/input dalam hubungan yang kuat dengan organisasi internasional yang relevan menyediakan data yang netral, objektif, dan transparan, termasuk International Grains Council;

13. Akan memperkuat kerja AMIS dengan berbagi informasi pasar dan perdagangan, dan kebijakan, serta mendukung the Rapid Response Forum untuk mengkoordinasikan kebijakan pada saat krisis dan bertindak sebagai mekanisme peringatan dini untuk memantau risiko pasar. Mengakui kontribusi the Platform for Agricultural Risk Management (PARM) untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian dan rantai pasok melalui metodologi inovatif untuk menilai dan mengelola risiko pertanian. Mengapresiasi hasil the Wheat Initiative and the Tropical Agriculture Platform (TAP).

### **III. Agri-prenurship yang inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan.**

14. Menyoroti pentingnya kerjasama antara lembaga penelitian nasional dan internasional dan pendanaan yang memadai untuk mengembangkan dan meningkatkan inovasi, termasuk teknologi pertanian digital, melalui swasta dan publik agar petani di seluruh dunia memiliki berbagai pilihan dalam mencapai aspirasi mereka. Menekankan pentingnya transformasi digital di bidang pertanian bersama dengan inovasi lain untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan produksi secara berkelanjutan, dan memperluas akses pasar dan peluang pasar. Mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan dan praktek inovasi dan teknologi dengan perlindungan kekayaan intelektual yang tepat dan menggarisbawahi pentingnya privasi dan keamanan data yang memadai.

15. Mencatat bahwa peluang untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan terletak pada peningkatan investasi yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan mendukung pembiayaan inovatif untuk teknologi pertanian yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam dan input, penggunaan kembali limbah pertanian, meningkatkan ketahanan dan hasil, dan memperkuat rantai nilai pertanian. Mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi digital yang melengkapi penguatan efek positif dari inovasi pertanian lainnya dan metode produksi berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan perubahan iklim.

16. Menyadari bahwa penerapan digitalisasi di bidang pertanian perlu perbaikan kebijakan, infrastruktur, dan dukungan kelembagaan, untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan, dan untuk meningkatkan kapasitas petani dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Mendorong fokus pada peningkatan keterampilan teknologi petani, khususnya petani kecil dan peningkatan kapasitas, untuk memperluas peluang dalam adopsi praktik pertanian berkelanjutan di tingkat petani, dan untuk meningkatkan akses ke keuangan dan partisipasi pemuda, perempuan, dan petani baru untuk menjadi agripreneur yang inovatif.

## COMMITMENT OF G20 MEMBER STATES' AGRICULTURE MINISTERS FOR THE GLOBAL FOOD SECURITY

(Written by Ferial Lubis, PISAgro, based on the Chair's Summary G20 Agriculture Ministers' Meeting "Balancing Food Production and Trade to Fulfill Food for All" document)

Throughout 2022 where Indonesia is the Presidency of Group 20 (G20), the discussion on the agricultural sector by the Ministers of Agriculture of the G20 countries is very important because it involves the need for global food availability.

The G20 members noted that since 2020, risks to food security and nutrition around the world have increased due to various factors, including the unprecedented COVID-19 pandemic, the influence of extreme weather events, the impact of the Russia – Ukraine war which exacerbated food insecurity global. The world is in the midst of an unprecedented global food security and nutrition crisis that could threaten achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The World Bank reports that there will be an additional between 75 million - 95 million people who will live in extreme poverty in 2022 and 255 million people will lose their jobs due to the Covid-19 pandemic. The State of Food Security and Nutrition in the World Report 2022 estimates that the Covid-19 pandemic has increased chronic malnutrition in 150 million people since 2019, and between 702 and 828 million people worldwide are affected by hunger in 2021 and around 670 million people are estimated will face hunger by 2030.

The G20 Agriculture Ministers who met in Denpasar, Bali on 28 September 2022, agreed with the following consensus:

a. Continuing to support the agricultural sector and rural population in managing agriculture and food systems in a sustainable manner and underscoring the importance of addressing food crises in a sustainable manner and decisively addressing all existing crises with equal intensity;

b. Commit to enhancing cooperation and coordination among G20 members and working with international organisations, the private sector, civil society and other partners, to eradicate poverty and enhance food and nutrition security, and work for inclusive and sustainable development, leaving no one behind.

c. Will promote: (1) resilient and sustainable agriculture and food systems, (2) open, fair, predictable, transparent and non-discriminatory agricultural trade to expand food availability and affordability for all, and (3) sustainable agripreneurship innovative through digital agriculture to improve the welfare of farmers in rural areas.

The three concepts are described in the form of the commitment of the G20 Ministers of Agriculture as follows:

### I. A resilient and sustainable agricultural and food system.

1. Highlighting the importance of accelerating the transformation of sustainable agriculture and food systems to become more resilient and able to withstand shocks and pressures, striving to ensure food availability and affordability in a manner that is consistent with ongoing efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Recognizing that agriculture and biodiversity are inextricably linked and recognizing the critical importance to halt and reverse biodiversity loss. Highlighting that diversification of food production and consumption based on local food sources is one way to strengthen the sustainability and resilience of local, regional and global agricultural and food systems;

2. Sustainable funding, targeted and responsible investment is urgently needed to improve

long-term food, security and nutrition, including the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security. Calls on the G20 Meeting of Agricultural Chief Scientists (MACS), the Food and Agriculture Organization (FAO), the Organization for Economic Co-operation Development (OECD), and other institutions to increase efforts to share information, technical guidance, and initiatives that can assist farmers to increase agricultural production and productivity in a sustainable manner;

3. Commit to reducing food waste globally by half per capita at the retail and consumer level by 2030 and reducing food losses during the production process and supply chain. However, realizing that there is still a shortage of data on food loss and waste at the country level and the guidelines used have not been harmonized, it was agreed to intensify efforts to collect relevant data to support evidence-based policies, including sharing best practices more through the Technical Platform on the Measurement and Reduction of Food Loss and Waste (FLW). Recognizing that reducing FLW requires joint decision-making actions and solutions, supporting the activities of FAO and The United Nations Environment Program (UNEP), as well as other relevant international organizations, such as the OECD, the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), the private sector, and Civil Society Organizations (CSOs) including implementation of the FAO Voluntary Code of Conduct for FLW Reduction and related initiatives from the UN Food Systems Summit (UNFSS);

4. It is believed that there is an important role for women, youth, indigenous peoples, rural and local communities in contributing to a resilient and sustainable agriculture and food system, also recognizing the important role of the family and small-scale agriculture in achieving sustainable agriculture and food systems. Commit to promoting economic diversification opportunities along the food value chain for these groups to help improve their quality of life through sustainable income-generating activities, including through specialized training and capacity building programmes. Welcomes the collaborative work to strengthen the role of

these groups through an inclusive, multi-stakeholder approach at the Committee on World Food Security (CFS);

5. Recognizing the important contribution of agricultural and food MSMEs to resilience, sustainability and inclusive growth, especially in the context of economic recovery after the Covid-19 pandemic. There is a significant need for catalytic investments (investments that will encourage more and greater investment in similar areas) in line with the CFS Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems (CFS-RAI) to support the availability and accessibility of finance, for smallholders, small businesses, fishermen, breeders and SMEs. It is hoped that the public sector will work side by side with SMEs in the agricultural and food sector so that they can support business risk values and encourage investment throughout the agricultural and food system. Support efforts to increase the accessibility of various financing instruments, including mixed financial models, especially in rural areas;

6. Reaffirms its commitment to adopt a One Health approach to accelerate the global fight against Antimicrobial Resistance (AMR) in agriculture and food systems and to prevent, mitigate and manage biological threats and risks to agriculture and food security. Recognizes and encourages the work of Quadripartite organizations to strengthen the application of the One Health approach to combating AMR in reducing the risk of emerging zoonotic diseases with pandemic potential and other threats to global public health security. Support the One Health High-Level Expert Panel formed by FAO, the World Organization for Animal Health (WOAH), UNEP, and the World Health Organization (WHO), and encourage the Quadripartite organization to complete its first One Health Joint Action Plan. Welcomes the adoption of the Codex Alimentarius "Guidelines on Integrated Monitoring and Surveillance of Foodborne AMR" and the "Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne AMR" as important tools to address AMR in line with the One Health Approach and its commitment to the use of antimicrobial agents. The G20 Ministers of Agriculture implemented the amendments to the "Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne AMR";

7. In order to strengthen animal and plant health systems to reduce the risk and spread of AMR, outbreaks of communicable diseases (EIDs), and create resilient zoonoses support ecosystems, agreed to support Quadripartite organizations for the sustainable and ambitious implementation of the 2015 Global Action Plan in consultation with States Member of the One Health Joint Plan of Action (2022-2026) regarding the implementation plan. It also provides encouragement to the International Plant Protection Convention (IPPC) to continue monitoring and participate in FAO One Health discussions and to evaluate information on the use of antimicrobials in plants or herbs for phytosanitary purposes within the scope of the Convention. Work with IPPC to promote the strengthening of regional and international forums to find the necessary solutions to ensure plant health;

8. Consider the vulnerability of agriculture and food systems to climate change and take into account the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Paris Agreement, and the relevant results and conclusions of the UNFCCC Conference of the Parties (COP) the Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA), it is necessary to pay attention to the fundamental priorities of maintaining food security and the importance of adaptation and mitigation for climate-resistant agriculture. Appreciate the initiatives launched at COP26 and previous COPs. Noting the importance of mutually beneficial cooperation in technology, capacity building, investing more in research, development and practice of climate-resilient technologies, and identification of existing funding opportunities and incentive schemes, tools, and sharing of knowledge on mutually agreed terms for the implementation of such actions inter alia through active engagement with the UNFCCC and other relevant initiatives. Recognizing that passing on and building on a legacy of good agricultural practices involving indigenous peoples and local communities is critical to agricultural systems' climate adaptation, mitigation, and sustainable development.

## **II. Agricultural trade that is open, fair, predictable, transparent and**

**non-discriminatory to expand the availability and affordability of food for all.**

9. Underscores the importance of strengthening basic rules that are open, fair, predictable, transparent, non-discriminatory, inclusive, equal and in line with a sustainable multilateral trading system, namely the World Trade Organization (WTO) as its core. This will increase market predictability, minimize distortion, increase business confidence, and allow agricultural and food trade to flow smoothly. Welcoming the progress made by WTO Members at the 12th Ministerial Conference on the issue of food security. Support the results of the WTO Ministerial Declaration on Emergency Response to Food Insecurity, which emphasizes the need to take concrete steps to facilitate trade and enhance the long-term function and security of food and agriculture in the global market, and underscores not to ban or restrict exports by means of that are not in accordance with WTO provisions. Emphasizing the provisions of the WTO Ministers' Decision that Members may not impose restrictions or restrictions on the purchase of food for non-commercial humanitarian purposes by the World Food Program (WFP);

10. Commit to working constructively with other WTO Members especially to strengthen global food trade and fulfill obligations as WTO members. Continue to avoid unjustified restrictive measures or distortions that lead to food and fertilizer price fluctuations in international markets that threaten to restore global food supply chains and more broadly to food and nutrition security, in particular for the most vulnerable areas;

11. Outline emergency measures which designed to overcome the Covid-19 pandemic which must be on target, proportional, transparent and temporary; that it should not create unnecessary trade barriers or disruption to global food supply chains; and consistent with WTO rules. Appreciate the government's response to avoid unjustifiable restrictive trade measures;

12. Recognizes the important contribution of the Agriculture Market Information System (AMIS) and the Group on Earth Observations Global

Agricultural Monitoring (GEOGLAM) to increase transparency and support coordinated policy responses for food security and nutrition through detailed monitoring of prices and availability of specific crops and fertilizers /input in strong relations with relevant international organizations providing neutral, objective and transparent data, including the International Grains Council;

13. Will strengthen AMIS work by sharing market and trade information, and policies, and support the Rapid Response Forum to coordinate policy in times of crisis and act as an early warning mechanism to monitor market risks. Recognizing the contribution of the Platform for Agricultural Risk Management (PARM) to enhancing the resilience of the agricultural sector and supply chain through innovative methodologies for assessing and managing agricultural risk. Appreciate the results of the Wheat Initiative and the Tropical Agriculture Platform (TAP).

### **III. Innovative agri-prenuership through digital agriculture to improve the welfare of rural farmers.**

14. Highlighting the importance of cooperation between national and international research institutions and adequate funding to develop and enhance innovation, including digital agricultural technology, through the private sector and the public so that farmers around the world have various choices in achieving their aspirations. Emphasizing the importance of digital transformation in agriculture along with other innovations to improve the welfare of farmers through increasing productivity and production in a sustainable manner, and expanding market access and market opportunities. Support the sustainable use and practice of innovation and technology with appropriate intellectual property protection and underscore the importance of adequate data privacy and security.

15. Noting that opportunities for sustainably increasing productivity lie in increasing responsible investment in agriculture and supporting innovative financing for agricultural technologies that increase efficiency in the use of natural resources and inputs, reuse

agricultural waste, increase resilience and yields, and strengthen agricultural value chain. Encourage greater use of digital technologies that complement the strengthening of the positive effects of other agricultural innovations and sustainable production methods to address the challenges of food security and climate change.

16. Recognizing that the application of digitalization in agriculture needs to improve policies, infrastructure, and institutional support, to increase connectivity and affordability, and to increase the capacity of farmers and other relevant stakeholders. Encourage a focus on improving the technological skills of farmers, particularly smallholders and capacity building, to expand opportunities in the adoption of sustainable agricultural practices at the farm level, and to increase access to finance and the participation of youth, women and new farmers to become innovative agripreneurs.

# Mengenal Lebih Dekat Ibu Shinta Kamdani dan B20 Indonesia, serta Perannya dalam Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN 2023

Wawancara PISAgro - Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Sekretariat B20 Indonesia

Pada kesempatan kali ini, PISAgro berbicara dengan Ibu Shinta Widjaja Kamdani untuk mengenal lebih jauh tentang peranan B20 Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia serta persiapan untuk Keketuaan ASEAN 2023.

**1. KTT G20 Indonesia, termasuk B20 Indonesia, baru saja diselenggarakan dengan meriah dan berbagai tokoh kunci dari berbagai negara telah hadir pada acara ini. Menurut Ibu, bagaimana indikator-indikator kesuksesan sebuah konferensi, terutama konferensi tingkat tinggi seperti B20 dan G20?**

Sebagai sebuah forum global yang berfungsi memberi rekomendasi kepada pemerintah, KTT ini bisa dikatakan sukses ketika output yang dihasilkan berhasil diadopsi untuk membentuk kebijakan/regulasi yang diterapkan baik secara domestik maupun global. Tahun ini, B20 secara kolektif telah sukses merumuskan 25 rekomendasi kebijakan dan 68 *policy action* yang didasarkan pada kondisi global saat ini, yang dihasilkan oleh 6 *Task Force* serta 1 *Action Council* sesuai dengan ruang lingkup isu masing-masing.

Hal tersebut terefleksikan melalui:

- **Communique**, sebagai sebuah pernyataan kesepakatan bersama dari B20 selaku *business engagement* G20 yang memberikan informasi komprehensif terkait ringkasan rekomendasi kebijakan, *key policy action* dan warisan kebijakan dari B20 Indonesia

- **Legacy programme** agar B20 dapat memberi dampak yang tidak berhenti setelah presidensi berakhir, melainkan bisa dilanjutkan di presidensi selanjutnya. Tentunya, untuk mengukur kesuksesan forum tingkat tinggi yang bersifat tidak mengikat, KADIN perlu mengawal bagaimana pemerintah mengimplementasikan usulan dan rekomendasi dari B20 ke dalam bentuk peraturan/regulasi serta kebijakan di level nasional.

- *Carbon Center of Excellence* (*Carbon CoE*) yang bertujuan meningkatkan akselesi perdagangan karbon melalui platform berbasis digital yang menyediakan informasi komprehensif yang dibutuhkan tentang karbon, sekaligus



menjadi *platform practices sharing* perdagangan karbon agar pelaku bisnis dapat mengakses pengetahuan yang diperlukan dan mempersiapkan diri untuk terlibat dalam perdagangan karbon. Untuk itu:

- Kami berkolaborasi dengan BloombergNEF dalam mengembangkan platform *Carbon Center of Excellence* berbasis digital yang ditargetkan untuk dapat terus berlanjut setelah presidensi B20 Indonesia tahun 2022.
- Menjajaki potensi kemitraan dengan lebih dari 20 institusi global, termasuk berbagai asosiasi pasar karbon global, institusi penelitian, dan para pemimpin industri global untuk memperluas dampak melalui kolaborasi dan sinergi.

- **B20 Wiki** yang bertujuan memberi dukungan bagi UMKM agar mampu mengembangkan kapabilitas agar dapat berkembang menjadi bisnis skala menengah, didukung oleh kolaborasi antar negara (seperti melalui pasar ekspor lintas negara G20) serta transformasi digital termasuk *key capabilities building*. Untuk program ini:

- Kami bermitra dengan JETRO (Japan External Trade Organization) serta TELKOM selaku *technological & knowledge partner*.
- Mempersiapkan UMKM melalui berbagai program *capacity building* untuk ekspor ke negara tujuan ekspor baru, UMUM beradaptasi dengan model perdagangan digital mulai dari segi promosi hingga perdagangannya, dan

# B20 SUMMIT INDONESIA 2022

13 - 14 November 2022 ✧ Bali, Indonesia



memfasilitasi pertemuan mereka dengan pembeli asing

- **One Global Women Empowerment (OGWE)** yang bertujuan menciptakan platform digital yang menghubungkan pemangku kepentingan yang relevan (seperti pemerintah, pelaku bisnis, investor, filantropis, organisasi sipil, dan penyedia layanan). Maka kami:

- Bekerjasama dengan lembaga *International Organisation of Employers* (IOE) akan berperan sebagai sekretariat yang memfasilitasi kegiatan operasional OGWE secara menyeluruh.
- Meningkatkan kolaborasi, saat ini tercatat ada 27 organisasi global yang tercatat telah menyatakan komitmen untuk berpartisipasi dalam layanan operasional platform OGWE.

- **Global One Shot** yang bertujuan mengajak para pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah, pelaku industri, dan organisasi kesehatan global, untuk berkolaborasi dalam memastikan ketersediaan vaksin sebagai solusi mengatasi masalah ketidakmerataan akses vaksin. Maka kami:

- Berkolaborasi dengan *The Global Health Security Consortium* (Tony Blair Institute of Global Change) yang berperan sebagai *Campaign lead* dan fasilitator *Global One Shot Campaign*.

Hasil kerja B20 bukanlah output yang “binding” atau mengikat secara hukum. Karena itu, sangat penting bagi KADIN dan chambers di negara-negara G20

untuk mengawal dan memastikan pemerintah G20 memastikan implementasi konkret rekomendasi kebijakan tersebut di masing-masing negara.

Dari sisi KADIN sebagai penyelenggara B20 Indonesia, kami terus berkolaborasi dengan *multi-stakeholders* dari negara G20 bahkan negara-negara lainnya. KADIN akan terus mengawal implementasi rekomendasi melalui 4 *legacy program* B20 Indonesia tersebut. Misalnya dengan melakukan mobilisasi sumber daya, pembiayaan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan kerjasama dengan komunitas bisnis internasional yang relevan. Di antaranya melalui *foreign direct investment*, eksport hingga *transfer of knowledge and technology* yang signifikan.

**2. Dalam KTT G20 beserta lingkup kerja lainnya, terdapat beberapa perjanjian yang telah dihasilkan, terutama Deklarasi Kepemimpinan Bali G20, Panduan Investasi Berkelanjutan, maupun Komunike B20. Dari perjanjian-perjanjian tersebut, menurut Ibu, apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan keberlanjutan di sektor pertanian?**

Selama perjalanan presidensi B20 Indonesia, isu ketahanan pangan menjadi prioritas di tengah-tengah proses B20 *Policy Paper Development* yang dipengaruhi secara masif oleh dampak perang Rusia-Ukraina yang terjadi di Februari. Krisis pangan

memang awalnya memang statusnya berfluktuasi di kalangan bisnis, namun karena adanya perang, krisis pangan baru yang efeknya dirasakan di bulan Maret membuat isu ini menjadi sangat krusial untuk didiskusikan secara luas di kalangan G20. Baik Ukraina dan Rusia adalah pengekspor utama komoditas utama - energi, makanan, pupuk, dan bahan baku tertentu, yang terdiri dari 12% dari total *calories* yang diperdagangkan di seluruh dunia. Pelabuhan-pelabuhan yang diblokir serta sanksi dan langkah-langkah kebijakan yang diberlakukan sehubungan dengan konflik secara khusus membahayakan pasokan komoditas utama dari kedua negara, memicu harga yang lebih tinggi, ketersediaan yang lebih rendah, dan krisis pangan global. Di sisi lain, harga minyak dan gas juga meningkat tajam, berkontribusi pada kenaikan inflasi dan *delay* terhadap pemulihan ekonomi, sehingga mengancam negara-negara dengan krisis sosial ekonomi.

Di Indonesia sendiri, menurut data Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI), ketahanan pangan Indonesia pada 2021 melemah dibanding tahun sebelumnya, dari angka skor indeks 61,4 menjadi 59,2. Menurut penilaian GFSI, walaupun harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dan ketersediaan pasokannya cukup memadai jika dibandingkan dengan

negara-negara lain, infrastruktur pertanian pangan di Indonesia juga masih di bawah rata-rata global disertai dengan standar nutrisi dan keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah.

Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa negara berkembang harus ikut serta menjadi bagian dari rantai pasok global, sektor bisnis pun menyadari pentingnya keterlibatan kami dalam membangun kemitraan yang memberdayakan, juga menciptakan sistem yang lebih inklusif agar negara berkembang bisa menghasilkan solusi atas tantangan global terkait krisis pangan, energi, hingga keuangan. Karena itu, dalam forum-forum yang telah diadakan bersama Pemerintah G20, B20 kerap mencari solusi bagaimana sektor bisnis dapat membantu krisi pangan.

Isu food security kemudian kami adopsi dalam B20 *Trade & Investment*, terutama dalam:

- Meningkatkan peran organisasi internasional untuk berkoordinasi dengan sektor swasta, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mengoordinasikan pemulihan dari krisis dan memfasilitasi aliran barang-barang penting, termasuk yang mendukung ketahanan pangan
- Mempromosikan krusialnya peran komite



manajemen krisis yang dapat berkomitmen untuk memperbaiki aliran *critical goods* yang terbuka dan swift selama krisis di masa depan

Dalam KTT G20, sebagian besar prioritas sektor bisnis yang dirangkum dalam Komunike B20 telah selaras dengan Deklarasi Pemimpin G20, termasuk terkait peningkatan ketahanan pangan.

Pertama, mengenai *trade restrictiveness* yang berdampak pada alur *flow critical goods* termasuk bahan pangan melalui mereformasi peranan WTO. Hal ini sudah selaras dengan Jangkauan G20 untuk meminimalisasi hambatan perdagangan atau gangguan terhadap rantai pasokan pangan global yang konsisten dengan aturan WTO.

Kedua, mengenai promosi pentingnya peran organisasi internasional untuk berkoordinasi dengan sektor swasta dan pemerintah untuk pemulihan krisis dan memfasilitasi arus *critical goods*, dengan ini G20 juga menekankan pentingnya mendukung negara-negara berkembang untuk berintegrasi dengan rantai nilai regional dan global untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan.

### **3. Sebagai tindak lanjut dari KTT maupun perjanjian pada G20 dan B20, apa sajakah peran dan kontribusi yang dilakukan oleh B20 Indonesia maupun mitra-mitranya untuk pertanian Indonesia?**

- Seperti digarisbawahi dalam Leader's Declaration G20, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan dan layak serta pengembangan kapasitas manusia, mendukung perdagangan inklusif, industrialisasi dan investasi, peningkatan produktivitas, serta pembukaan potensi ekonomi masa depan, khususnya bagi UMKM dan usaha baru.

Saya percaya, pelaku usaha perlu mengambil peranan dalam membangun ekosistem digital yang mumpuni untuk mendukung pengembangan sistem pangan dan pertanian yang lebih resilien serta berkelanjutan. Sektor swasta memiliki modal serta keahlian yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Hal ini menjadi salah satu bagian dari policy action yang direkomendasikan *Trade & Investment TF B20 Indonesia*, yang secara khusus mendorong

koordinasi antara sektor swasta, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mengkoordinasikan pemulihan dari krisis dan memfasilitasi aliran barang-barang penting, termasuk yang mendukung ketahanan pangan.

B20 *Trade & Investment* juga mempromosikan keluaran melalui program *Inclusive Closed Loop cooperation* terutama di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan ekosistem pendukung bagi UMKM dan *marginalized group* seperti petani untuk mempermudah akses ke rantai pasokan mereka dari akses ke bahan input, serta lembaga keuangan untuk pinjaman dan asuransi, koordinasi pasar offtake, dan dukungan regulasi dari pemerintah. B20 Indonesia mengajak pelaku usaha dari seluruh dunia untuk mengikrarkan dukungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan untuk pemberdayaan, inklusivitas petani melalui *inclusive closed loop pledge* yang hingga saat ini sudah didukung oleh lebih dari 39 perusahaan multinasional di B20.

### **4. Setelah G20, tahun depan Indonesia didapuk sebagai ketua ASEAN di tahun 2023. Menurut Ibu, bagaimana kesiapan Indonesia, terutama dari KADIN untuk Keketuaan ASEAN pada tahun 2023?**

Dalam keketuaan Indonesia di forum ASEAN tahun depan, KADIN Indonesia secara khusus ditunjuk untuk bertanggung jawab atas Indonesia BAC (*Business Advisory Council*), yang akan mengembangkan program kerja berdasarkan 3 topik utama sektor vertikal (yang sebelumnya juga menjadi fokus dalam KTT G20 yakni:

- *Global Health Architecture*
- *Digital Transformation*
- *Sustainable Energy Transition*

Bisa dikatakan, Indonesia mengambil alih kepemimpinan ASEAN di momentum yang cukup menantang secara global. Kami tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang tidak main-main, karena itu persiapan sudah mulai kami kerahkan sedari sekarang.

Kami sedang dalam proses berdiskusi dengan Sekretariat ASEAN BAC dan kelompok kerja yang ada di ASEAN, seperti *Digital, Sustainability, Healthcare*, yang kemudian secara paralel akan dilanjutkan dengan perumusan rencana kerja BAC Indonesia 2023 secara lebih mendetail. Sekitar akhir Januari

atau awal Februari mendatang akan dilangsungkan seremoni penyerahan keketuaan ASEAN BAC dari Kamboja ke Indonesia, yang selanjutnya akan diteruskan dengan berbagai kegiatan dialog serta *Council Meetings*.

### **5. Peran apakah yang ibu harapkan kepada PISAgro untuk Keketuaan ASEAN pada tahun 2023?**

Sebagai Ketua ASEAN 2030, Indonesia berencana akan memanfaatkan hasil forum ASEAN Kamboja 2022 serta keluaran pembahasan dari G20/B20 Indonesia untuk mengembangkan program kerja ASEAN di tahun depan. Forum ASEAN tahun lalu sendiri memiliki tiga prioritas kunci yakni Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

Berkaca dari pertemuan G20 tahun ini, kita menyaksikan bagaimana para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 menyadari bahwa hulu dari permasalahan ketahanan pangan bertumpu kepada sektor pertanian. Tujuan utama dari penataan manajemen pertanian saat ini adalah tercapainya ketahanan pangan hingga mencapai level kedaulatan pangan. Strategi pertanian modern yang menghadirkan kolaborasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan menjadi amat krusial dalam mendorong ketahanan pangan masa depan. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara berbasis pertanian tentunya harus bisa memanfaatkan momentum keketuaan dalam kedua forum global ini untuk mendongkrak produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Berangkat dari hal tersebut, tentunya kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil peranan aktif dalam menyukseskan keketuaan Indonesia di forum ASEAN 2023. Tidak terkecuali PISAgro yang selama ini telah mewadahi kemitraan swasta-pemerintah-publik untuk mengatasi masalah ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dan sinergi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan akan menjadi modal yang teramat penting untuk memungkinkan kita menghadirkan solusi konkret dalam membentuk arah pemulihan, meratakan kesejahteraan masyarakat serta memastikan keberlanjutan masa depan kita.



# Get to Know More About Shinta Kamdani and B20 Indonesia, and Its Role on the G20 Presidency and 2023 ASEAN Chairmanship

A PISAgro Interview - Shinta Widjaja Kamdani, Chairperson of the B20 Indonesia

On this occasion, PISAgro had a chance to interview with Mrs. Shinta Widjaja Kamdani to learn more about Indonesia's B20 role in Indonesia's G20 Presidency and preparations for the 2023 ASEAN Chair.

## 1. The G20 Indonesia Summit, including B20 Indonesia, has just been held with great fanfare and various key figures from various countries have attended this event. In your opinion, what are the indicators of the success of a conference, especially high-level conferences such as the B20 and G20?

As a global forum whose function is to provide recommendations to the government, this summit can be said to be successful when the resulting output is successfully adopted to form policies/regulations that are applied both domestically and globally. This year, the B20 has collectively succeeded in formulating 25 policy recommendations and 68 policy actions based on current global conditions, which were produced by 6 Task Forces and 1 Action Council in accordance with the scope of their respective issues.

This is reflected through:

- **Communiqué**, as a statement of joint agreement from B20 as the G20 business engagement which provides comprehensive information regarding a summary of policy recommendations, key policy actions and policy legacy from B20 Indonesia

- **Legacy program** so that B20 able to having an impact that doesn't stop after the presidency ends, but can be continued in the next presidency. Of course, to measure the success of a non-binding high-level forum, KADIN needs to oversee how the government implements proposals and recommendations from B20 in the form of rules/regulations and policies at the national level.

- Carbon Center of Excellence (Carbon CoE) which aims to increase carbon trading acceleration through a digital-based platform that provides comprehensive information about carbon, and carbon trading practice sharing platform so that business people can access the necessary knowledge and prepare themselves to be involved in trading carbon. Therefore:



- We are collaborating with BloombergNEF in developing a digital-based Carbon Center of Excellence platform which is targeted to continue after Indonesia's B20 presidency in 2022.

- Explore potential partnerships with more than 20 global institutions, including global carbon market associations, research institutions, and global industry leaders to expand impact through collaboration and synergy.

- **B20 Wiki** which aims to provide support for MSMEs to be able to develop capabilities so they can develop into medium-scale businesses, supported by collaboration between countries (such as through the G20 cross-country export market) as well as digital transformation including building key capabilities. For this programme:

- We partner with JETRO (Japan External Trade Organization) and TELKOM as a technological & knowledge partner.
- Preparing MSMEs through various capacity building programs for exports to new export destination countries, GENERAL adapting to the digital trade model starting from the promotion to trade perspective, and facilitating their meetings with foreign buyers

- **One Global Women Empowerment (OGWE)** which aims to create a digital platform that connects

# B20 SUMMIT INDONESIA 2022

13 - 14 November 2022 ✪ Bali, Indonesia



relevant stakeholders (such as governments, businesses, investors, philanthropists, civic organizations and service providers). Then we:

- Collaborate with the International Organization of Employers (IOE) will act as a secretariat that facilitates the overall operational activities of the OGWE.
- Increasing collaboration, currently there are 27 global organizations that have stated their commitment to participate in the operational services of the OGWE platform.
  
- Global One Shot** which aims to invite stakeholders consisting of governments, industry players, and global health organizations, to collaborate in ensuring the availability of vaccines as a solution to overcoming the problem of inequality in access to vaccines. Then we:
  - Collaborate with The Global Health Security Consortium (Tony Blair Institute of Global Change) who acts as Campaign lead and facilitator of Global One Shot Campaign

B20 work results are not “binding” or legally binding outputs. Therefore, it is very important for KADIN and chambers in the G20 countries to oversee and ensure that the G20 governments ensure the concrete implementation of these policy recommendations in each country.

From KADIN's point of view, as the organizer of B20 Indonesia, we continue to collaborate with

multi-stakeholders from the G20 countries and even other countries. KADIN will continue to oversee the implementation of the recommendations through the 4 Indonesian B20 legacy programs. For example by mobilizing resources, financing, to accelerate economic growth by collaborating with the relevant international business community. Among them through foreign direct investment, exports to a significant transfer of knowledge and technology.

**2. In the G20 Summit and other scopes of work, several agreements have been produced, notably the Bali G20 Leadership Declaration, the Guide to Sustainable Investment, and the B20 Communiqué. From these agreements, according to you, what needs to be considered to improve the welfare of farmers and increase sustainability in the agricultural sector?**

During the journey of Indonesia's B20 presidency, the issue of food security became a priority in the midst of the B20 Policy Paper Development process which was massively affected by the impact of the Russia-Ukraine war that occurred in February. Initially, the status of the food crisis fluctuated in business circles, but because of the war, a new food crisis whose effects were felt in March made this issue very crucial for widespread discussion among the G20. Both Ukraine and Russia are major exporters of key commodities - energy, food, fertilizers and certain raw materials, which comprise

12% of total calories traded worldwide. The blocked ports and the sanctions and policy measures imposed in connection with the conflict in particular jeopardized the supply of key commodities from both countries, triggering higher prices, lower availability and a global food crisis. On the other hand, oil and gas prices also rose sharply, contributing to rising inflation and delaying economic recovery, thus threatening countries with socio-economic crises.

In Indonesia itself, according to data from the Global Food Security Index (GFSI), Indonesia's food security in 2021 will weaken compared to the previous year, from an index score of 61.4 to 59.2. According to GFSI's assessment, although food prices in Indonesia are quite affordable and the availability of supplies is adequate when compared to other countries, Indonesia's food-agriculture infrastructure is also still below the global average accompanied by nutritional standards and a variety of staple foods that are also still considered low.

In line with President Joko Widodo's directive that developing countries must participate and become part of the global supply chain, the business sector also recognizes the importance of our involvement in building empowering partnerships, as well as

creating a more inclusive system so that developing countries can produce solutions to global challenges related to the food crisis, energy, to finance. Because of this, in the forums that have been held with the G20 Governments, the B20 often look for solutions on how the business sector can help the food crisis.

We then adopted the issue of food security in B20 Trade & Investment, especially in:

- Enhance the role of international organizations to coordinate with the private sector, government and other stakeholders, to coordinate recovery from crises and facilitate the flow of essential goods, including those that support food security
- Promote the crucial role of crisis management committees that can commit to improving the open and swift flow of critical goods during future crises

At the G20 Summit, most of the business sector priorities summarized in the B20 Communique were aligned with the G20 Leader's Declaration, including those related to increasing food security.

First, regarding trade restrictiveness which has an impact on the flow of critical goods including food through reforming the WTO Roles. This has been



aligned with G20 Coverage to minimize trade barriers or disruption to global food supply chains consistent with WTO rules.

Second, regarding promoting the importance of the role of international organizations to coordinate with the private sector and government for crisis recovery and facilitating the flow of critical goods, the G20 also emphasizes the importance of supporting developing countries to integrate with regional and global value chains to overcome poverty and hunger.

### **3. As a follow-up to the Summit and agreements at the G20 and B20, what are the roles and contributions made by B20 Indonesia and its partners for Indonesian agriculture?**

- As outlined in the G20 Leader's Declaration, governments encourage the use of digital technology to build resilient and sustainable food and agriculture systems, create sustainable and decent jobs and human capacity development, support inclusive trade, industrialization and investment, increase productivity, and unlock economic potential future, especially for MSMEs and new businesses.

I believe that business actors need to take a role in building a capable digital ecosystem to support the development of a more resilient and sustainable food and agriculture system. The private sector has the necessary capital and expertise to make this happen.

This is part of the policy action recommended by Trade & Investment Task Force of B20 Indonesia, which specifically encourages coordination between the private sector, government and other stakeholders, to coordinate recovery from crises and facilitate the flow of essential goods, including those that support food security.

B20 Trade & Investment also promotes outcomes through the Inclusive Closed Loop cooperation program, especially in Indonesia which aims to provide a supporting ecosystem for MSMEs and marginalized groups such as farmers to facilitate access to their supply chains from access to input materials, as well as financial institutions for loans and insurance, offtake market coordination, and regulatory support from the government. B20 Indonesia invites business players from around the

world to pledge continuous and sustainable support for empowerment, inclusiveness of farmers through an inclusive closed loop pledge which has so far been supported by more than 39 multinational companies in B20.

### **4. After the G20, next year Indonesia will be appointed as chairman of ASEAN in 2023. According to you, how is Indonesia's readiness, especially from KADIN for ASEAN chairmanship in 2023?**

In Indonesia's chairmanship at the ASEAN forum next year, KADIN Indonesia was specifically appointed to be in charge of the Indonesia BAC (Business Advisory Council), which will develop a work program based on 3 main vertical sector topics (which were previously also the focus of the G20 Summit) namely:

- Global Health Architecture
- Digital Transformation
- Sustainable Energy Transition

It can be said that Indonesia is taking over the leadership of ASEAN in a moment that is quite challenging globally. We know that this is a responsibility that is no joke, that's why we have started to deploy preparations from now on.

We are in the process of discussing with the ASEAN BAC Secretariat and working groups in ASEAN, such as Digital, Sustainability, Healthcare, which will then be continued in parallel with the formulation of the BAC Indonesia 2023 work plan in more detail. Around the end of January or early February, a ceremony will be held to hand over the chairmanship of the ASEAN BAC from Cambodia to Indonesia, which will then be followed up with various dialogue activities and Council Meetings.

### **5. What role do you hope for PISAgro for ASEAN Chair in 2023?**

As Chair of ASEAN 2030, Indonesia plans to utilize the results of the ASEAN Cambodia 2022 forum as well as the outcome of discussions from Indonesia's G20/B20 to develop an ASEAN work program next year. Last year's ASEAN Forum itself had three key priorities namely the ASEAN Political-Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Socio-Cultural Community.

Reflecting on this year's G20 meeting, we witness

how world leaders who are members of the G20 realize that the upstream of the problem of food security rests on the agricultural sector. The main objective of the current agricultural management arrangement is the achievement of food security to the level of food sovereignty. Modern agricultural strategies that present collaboration between science, technology and the environment are crucial in driving future food security. Moreover, Indonesia as an agriculture-based country, of course, must be able to take advantage of the leadership momentum in these two global forums to boost productivity and improve the welfare of farmers.

Departing from this, of course we hope that all stakeholders can take an active role in the success of Indonesia's chairmanship in the ASEAN 2023 forum. PISAgro is no exception, which has so far facilitated private-government-public partnerships to address national food security issues. Collaboration and solid synergy between all stakeholders will be a very important capital to enable us to present concrete solutions in shaping the direction of recovery, distributing people's welfare and ensuring the sustainability of our future.





 [www.pisagro.org](http://www.pisagro.org)

 Pisagro\_secretariat

   PISAgro

**PISAgro Secretariat**  
[contact@pisagro.org](mailto:contact@pisagro.org)

**Insan Syafaat**  
[isyafaat@pisagro.org](mailto:isyafaat@pisagro.org)

**Sinarmas Land Plaza Tower 2**  
22th Floor, JI MH. Thamrin Kav. 51  
Jakarta 10350, Indonesia

**T. +62 21 5047 8888**

**F. +62 21 5043 8888**